





RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI GORONTALO



 (0435) 827615

 dishub@gorontaloprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS PERHUBUNGAN

KOMPLEKS BLOKPLAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
Jln. Tayeb Mohammad Gobel, Desa Ayula Utara, Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO Nomor : 24 / DISHUB / SK / III / 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** :
- Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2045

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:

1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyesuaian dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3 maret 2025



Dr. Ir. H. M. Jaja Nganro, ST, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19680511 199803 1 009

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
NOMOR : 24 / DISHUB / SK / III / 2025
TANGGAL : 3 Maret 2025
TENTANG : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029

Pengarah/ Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Angkutan Jalan
2. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
3. Kepala Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi

Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Anggota : 1. Pejabat Fungsional Lingkup Dinas Perhubungan
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
4. Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Pengembangan Transportasi
5. Plt. Kepala Seksi Angkutan Orang tidak dalam Trayek dan Angkutan
Barang
6. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan



Kepala Dinas

Dr. H. M. Jarrol Nganro, ST, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680511199803 1 009

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya patut dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama (lima) tahun setelah Gubernur terpilih dan tanpa kemungkinan disuatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya dibidang Perhubungan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Strategis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk ini segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam rangka lebih memberikan masukan yang berarti dalam dokumen Rencana Strategis ini selanjutnya.

Terima kasih



Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Gorontalo

Dr. Ir. Hi. M. GAMAL NGANRO, ST, M.Si

Penyelia Utama Madya / IV d

NIP.196805111998031009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....	6
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis OPD.....	64
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	68
3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program sesuai dengan RPJMD Gorontalo 2025 – 2029	68
3.2. Tujuan Renstra	69
3.3. Sasaran Renstra	69
3.4. Strategi Renstra.....	74
3.5. Arah Kebijakan	74
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB V PENUTUP.....	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan konektivitas suatu wilayah.

Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut, udara dan kereta api mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun internasional. Namun demikian, agar pembangunan transportasi daerah lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pengembangannya.

Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan (*sustainability*), yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dari berbagai sektor dan berwawasan lingkungan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dimana Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo diharapkan dapat lebih fokus dalam pelayanan sektor perhubungan.

Untuk itu dalam mendukung program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijabarkan lagi sesuai dengan tugas dan fungsi ke dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis ini harus menjadi acuan dari semua tingkatan perencanaan. Evaluasi dan penyesuaian setiap tahun harus dilakukan agar Rencana Strategis ini tetap relevan dengan spirit zaman.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

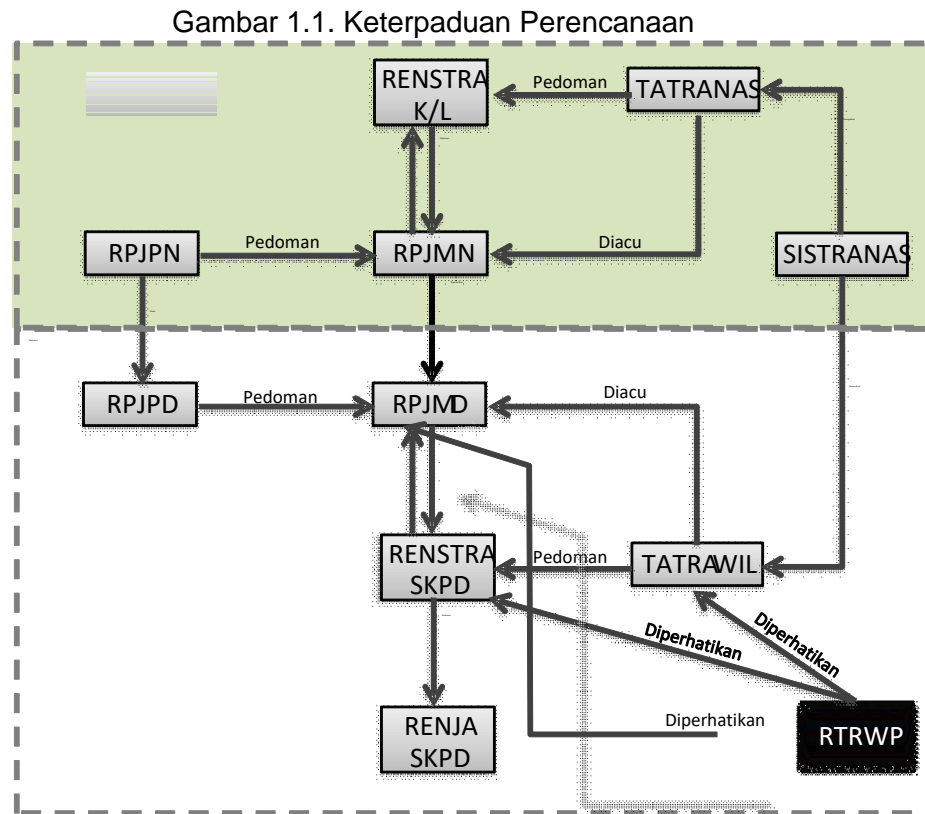
Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo seharusnya memiliki keterpaduan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam perencanaan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo saat ini secara garis besar terdapat 2 alur pendekatan perencanaan yakni alur pendekatan perencanaan pembangunan sektoral dimana perencanaan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah melalui sektor perhubungan. Dokumen perencanaan yang mewakili alur ini yakni Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang merupakan perwujudan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) di daerah, dimana dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo. Alur pendekatan perencanaan lainnya adalah alur pendekatan perencanaan pembangunan regional/wilayah secara utuh dan terpadu dimana perencanaan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini terdapat dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari perencanaan pembangunan regional/daerah maka penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo yang merupakan dokumen perencanaan makro daerah. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di bidang perhubungan, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo harus juga berpedoman pada Tatrawil, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Renstra

harus memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo dan Dokumen KLHS Provinsi Gorontalo.

Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2010 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Gorontalo
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045
15. Permendagri No 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurung waktu 2025 – 2029, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman OPD/Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa perhubungan yang handal dan berdaya saing .
2. Sebagai pedoman OPD/Dinas dalam penyusunan RKA - OPD
3. Sebagai tolak ukur OPD/Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada kurun waktu tertentu.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan **Bab Pendahuluan** yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra seperti Latar Belakang perlunya penyusunan Renstra, Pengertian, Maksud dan Tujuan penyusunan, Landasan Penyusunan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan **Bab Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah** yang memuat hal hal terkait pelayanan yang telah dilakukan oleh OPD dalam waktu 5 (tahun) terakhir, beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dan beberapa hal yang menjadi isu strategis OPD.
- BAB III** Merupakan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029, dan berpedoman pada Instruksi Mendagri No 2 Tahun 2025
- BAB IV** Merupakan **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** yang memuat rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sesuai Kepmendagri No 900 Tahun 2023
- BAB V** Merupakan **Bab Penutup**
- LAMPIRAN** Matriks Program 5 (lima) Tahun

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Bertitik tolak dari Undang-Undang tersebut maka Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan telah membentuk Badan, Dinas dan Biro yang mana di dalamnya termasuk pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

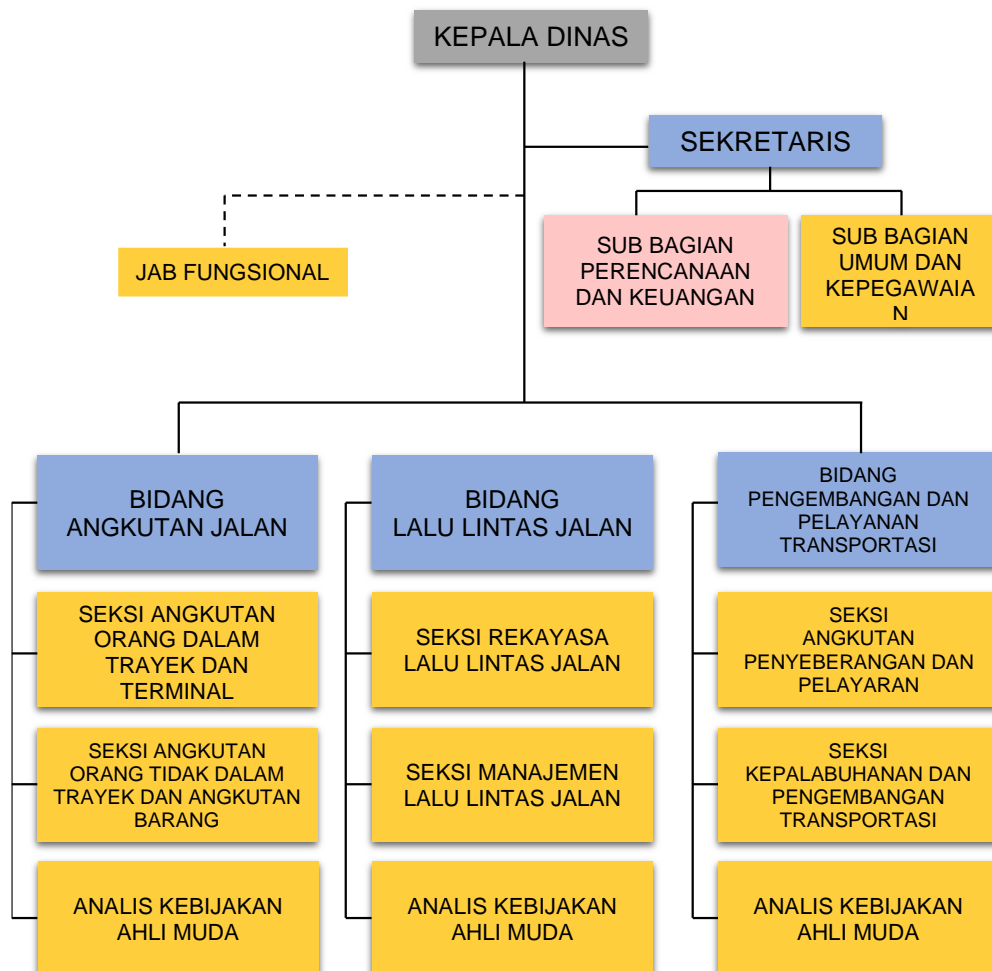
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan agar pelayanannya dapat lebih optimal sesuai dengan perkembangan waktu. Adapun perubahan-perubahan nomenklatur tersebut sebagai berikut :

- Dinas Perhubungan, Postel, Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Dinas Perhubungan, Postel dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi.
- Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
- Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
- Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekosentrasi di bidang Perhubungan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang Perhubungan.
- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang Perhubungan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan.
- Pelaksanaan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang perhubungan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekosentrasi dibidang perhubungan untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan,;
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang Perhubungan;
- Menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan.
- Melaksanakan tugas Konsultasi dan koordinasi dibidang perhubungan,

a) KEPALA DINAS

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perhubungan/ transportasi yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Fungsi :

- Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang transportasi;
- Melaksanakan urusan-urusan pemerintah di bidang transportasi;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang transportasi;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang transportasi;
- Melaksanakan pengawasan fungsional;
- Melaksanakan teknis operasional bidang transportasi;
- Pemantauan dan evaluasi program di bidang transportasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai bidang tugasnya.

b) SEKRETARIS

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pusat data elektronik, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- Pengelolaan umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala; dan
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan tim anggaran pemerintah daerah.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

I. Subag Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Fungsi :

- Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- Mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;

- Pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- Menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- Menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standart Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Minimum (SPM);
- Menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.

II. Subag Perencanaan dan Keuangan :

Tugas :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan,

pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan di lingkup Dinas.

Fungsi :

- Menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
- Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
- Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- Menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
- Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- Menatausahakan pengelolaan keuangan;
- Menghimpun dan mengolah data keuangan;
- Menyusun laporan keuangan SKPD;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran;
- Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- Mengelola pembayaran gaji pegawai;
- Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- Membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;

- Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- Menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.

c) BIDANG ANGKUTAN JALAN

Tugas :

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, barang, terminal serta pepaduan moda dan pengembangan jaringan angkutan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, barang, terminal serta pepaduan moda dan pengembangan jaringan angkutan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, barang, terminal serta pepaduan moda dan pengembangan jaringan angkutan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

I. Seksi Angkutan Orang dalam Trayek dan terminal;

Tugas :

Seksi Angkutan Orang dalam Trayek mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek dan terminal.

Fungsi :

- Penyusunan rencana umum jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis Angkutan Antar Kota Antar Provinsi.
- Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan (izin trayek, insedentil) kendaraan Angkutan dalam Trayek (AKDP);
- Menyiapkan bahan penyusunan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- Memfasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek Antar Kota Antar Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe B; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang :**Tugas :**

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pengendalian angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

Fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam satu (1) daerah Provinsi;
- Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan angkutan orang, angkutan antar jemput angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan antarkota dalam provinsi;
- Penyediaan angkutan umum untuk angkutan jasa angkutan barang lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) Provinsi;
- Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan;
- Memfasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) BIDANG LALU LINTAS JALAN

Tugas :

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu lintas Jalan terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

I. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Tugas :

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

Fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis manajemen lalu lintas jalan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program di bidang pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas jalan;
- Memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan Provinsi.

II. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Tugas :

Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.

Fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rekayasa lalu lintas jalan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi lalulintas jalan;

e) BIDANG PELAYARAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

Tugas

Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayaran, pengendalian kawasan sekitar Bandar Udara serta koordinasi dalam pengembangan transportasi (pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian).

Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian;
- Pengendalian kawasan sekitar bandar udara serta koordinasi dalam pengembangan transportasi (pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian); dan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayaran Dan Pengembangan Transportasi terdiri dari :

1. Seksi Kepelabuhanan dan Pengembangan Transportasi;
2. Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

I. Seksi Kepelabuhanan dan Pengembangan Transportasi

Tugas

Seksi Kepelabuhanan dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemantauan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan infrastruktur baik di Bandar Udara, Pelabuhan dan Perkeretaapian, dan penyusunan laporan.

Fungsi

- Melakukan penyiapan bahasan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional serta pengelolaan Kawasan sekitar bandar udara.
- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pengembangan sarana dan prasarana transportasi (pelayaran, penyeberangan, penerbangan dan perkeretaapian);
- Mengumpulkan, menelaah dan mengklasifikasi data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia di seksi kepelabuhanan dan pengembangan transportasi (penyeberangan, penerbangan dan perkeretaapian);
- Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis data dan pemantauan serta mencatat perkembangan dan permasalahan secara periodik di seksi kepelabuhanan dan pengembangan transportasi (penyeberangan, penerbangan dan perkeretaapian);
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan

Tugas

Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan bersama-sama dengan UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Gorontalo bersama I/K/L terkait Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan.

Fungsi

1. Melakukan penyiapan badan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:
 - a. Penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi
 - c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
 - d. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
2. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan usulan trayek perintis dan tol laut serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan angkutan perintis dan tol laut yang beroperasi di Provinsi Gorontalo;
3. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi terkait Angkutan penumpang dan barang;
4. mengumpulkan, menelaah dan mengklasifikasi data angkutan pelayaran dan penyeberangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
5. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis data angkutan dan pemantauan serta mencatat perkembangan dan permasalahan secara periodik di seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan;

6. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait ongkath barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
7. mengumpulkan, menelaah dan mengklasifikasi data Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
8. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis data Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dan pemantauan serta mencatat perkembangan dan permasalahan secara periodik
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

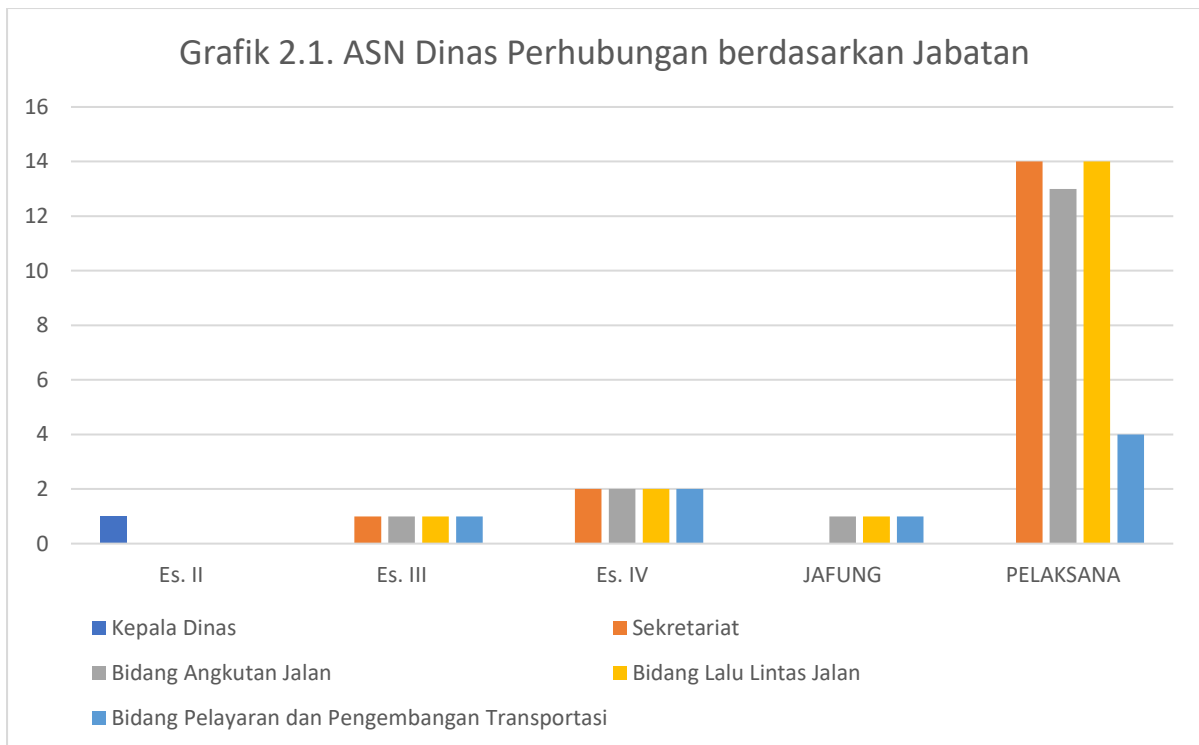
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu organisasi publik lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya yang dapat menggerakkan roda organisasi. Sumber daya (resources) yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	JABATAN STRUKTURAL (ORANG)				
		Es. II	Es. III	Es. IV	JAFUNG	PELAKSANA
1	Kepala Dinas	1				
2	Sekretariat		1	2		14
3	Bidang Angkutan Jalan		1	2	1	13
4	Bidang Lalu Lintas Jalan		1	2	1	14
5	Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi		1	2	1	4
JUMLAH		1	4	8	3	45
TOTAL		61				

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Grafik 2.1. Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan



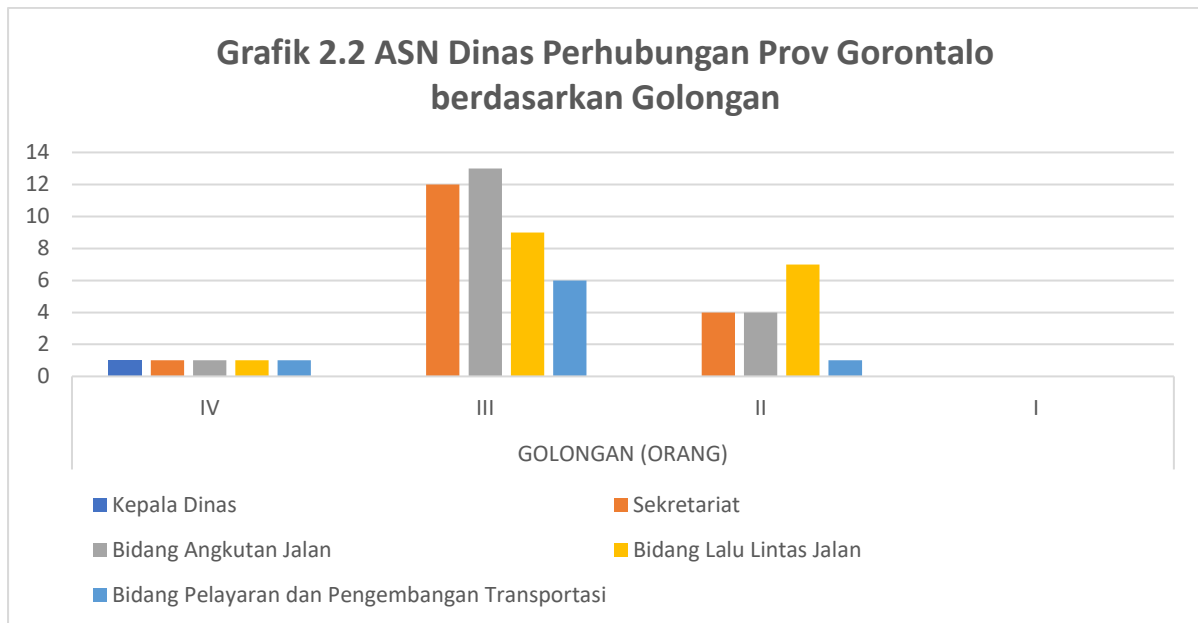
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Tabel 2.2 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	GOLONGAN (ORANG)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretariat	1	12	4	
3	Bidang Angkutan Jalan	1	13	4	
4	Bidang Lalu Lintas Jalan	1	9	7	
5	Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi	1	6	1	
	JUMLAH	5	40	16	0
	TOTAL	61			

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Grafik 2.2. Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan



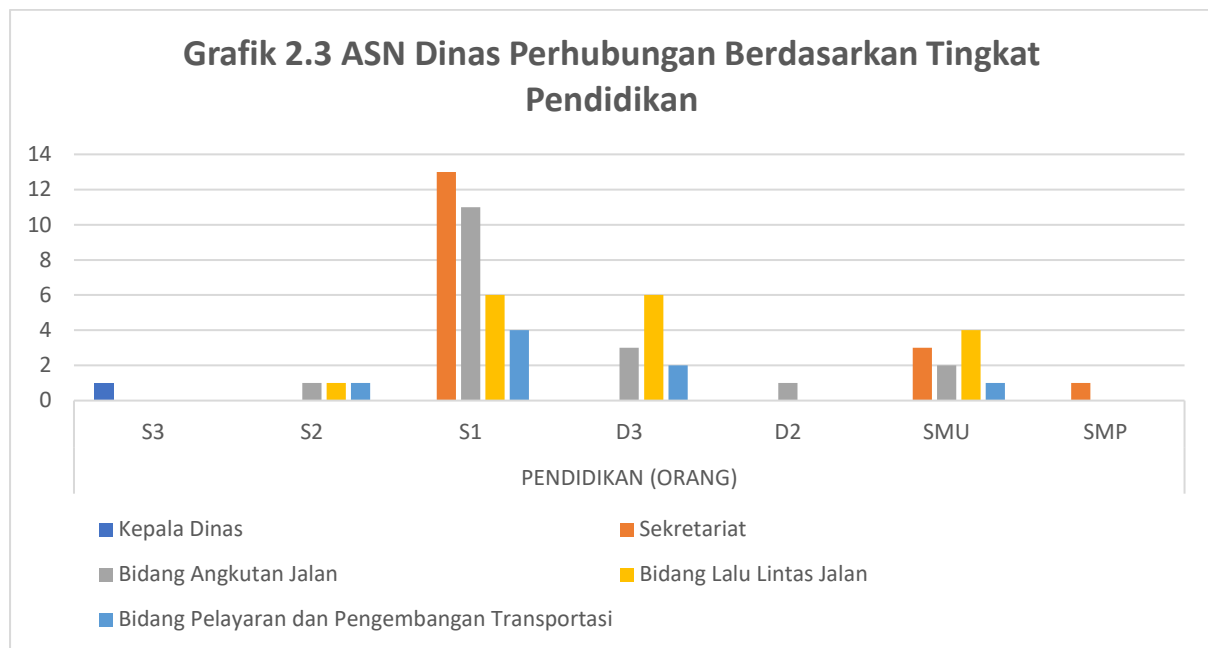
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Tabel 2.3 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN (ORANG)						
		S3	S2	S1	D3	D2	SMU	SMP
1	Kepala Dinas	1						
2	Sekretariat			13			3	1
3	Bidang Angkutan Jalan		1	11	3	1	2	
4	Bidang Lalu Lintas Jalan		1	6	6		4	
5	Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi		1	4	2		1	
	JUMLAH	1	3	34	11	1	10	1
	TOTAL	61						

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Grafik 2.3 Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1; 2.2; dan 2.3 diatas Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sampai dengan Bulan Mei 2015 berjumlah 61 orang, Tenaga PTT Data Base sebanyak 16 orang dan Tenaga Outsorching sebanyak 5 orang sehingga jumlah total Pegawai Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 82 orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pada 4 bidang yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan dan Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi

C. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, namun diketahui bahwa saat ini Dinas Perhubungan masih menggunakan 1 (satu) Gedung yang sama dengna Kaantor Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi..

Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI			KET
			RB	RR	B	
A	TANAH (KIB A)					
	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan	1	-	-	1	
B	PERALATAN MESIN (KIB B)					
1	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor					
	Mobil	7 Unit	-	1	6	
	Bus	11 Unit	-	-	11	
	Motor	11 Unit	-	-	11	
	Rotator	2 Unit	1	-	1	
2	Alat-alat Ukur					
	Timbangan	2 Unit	1	-	1	
	Digital Soil Thermometer	1 unit	-	-	1	
3	Peralatan Kantor					
	Mesin Facsimile	2 Unit	-	-	2	
	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	2	-	-	
	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	-	-	1	
	Mesin Absensi	1 Unit	-	-	1	
	Finger Print dan Anjungan Absensi	1 Unit	1	-	-	
4	Perlengkapan Kantor					
	Rak Kayu	3 Unit	-	-	3	
	Lemari Besi	3 Unit	-	-	3	
	Lemari Arsip	5 Unit	-	-	5	
	Brankas	1 buah	-	-	1	
	AC	16 unit	1	-	15	
	Scanner	2 Unit	1	-	1	
5	Komputer					
	Komputer/PC	12 Unit	-	2	10	
	Laptop/Notebook	15 Unit	-	3	12	
	Hardisk	1	-	-	1	
	Printer	20 Unit	1	-	19	
	Komputer Unit/Server	1 Unit	-	-	1	
	Komputer Unit Lainnya (UPS)	7 Unit	-	2	5	
6	Meubelair					
	Meja Kerja	39 Buah	-	-	39	
	Meja Rapat	13 Buah	4	-	9	
	Meja Panjang	3 Buah	-	-	3	
	Kursi Kerja	34 Buah	-	-	34	
	Kursi Tunggu	2 Buah	-	-	2	
	Kursi Sofa	5 set	-	-	5	

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI			KET
			RB	RR	B	
	Kursi Rapat	25 Buah	-	-	25	
7	Alat-alat Studio					
	Kamera Digital	2 Buah	-	-	2	
	Amplifiler	1 Buah	-	-	1	
	Proyektor/LCD	2 Unit	1	-	1	
	Sound System	3 Buah	-	-	3	
8	Alat-Alat Komunikasi					
	Telepon	4 Buah	4	-	-	
	TV	3 Buah	-	-	3	
	Microphone	10 Buah	2	-	8	
	Handy Talky (HT)	75 Buah	9	-	66	
	CCTV	1 Buah	1	-	-	
	Audio Adress	12 Buah	12	-	-	
C	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)					
	Bangunan Gedung Kantor	2 unit	-	-	2	
	Bangunan Gudang	1 unit	-	-	1	
	Bangunan Gedung Pertokoan	2 unit	2	-	-	
	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1 unit	-	-	1	
	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2 unit	-	-	2	
	Bangunan Gedung Terminal	1 unit	1	-	-	
	Bangunan Fasilitas Umum	5 unit	2	-	3	
	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	3 Paket	-	-	3	
	Taman	2 unit	1	-	1	
D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)					
	Jalan Provinsi Lain-lain	4 Paket	-	-	4	
	Jalan Khusus	1 Paket	-	-	1	
	Bangunan Penguat tebing/pantai	1 paket			1	
	Jaringan Transmisi (Genset)	1 unit	-	-	1	
	Jaringan Listrik Lainnya	5 unit	-	-	5	
	Jalan Telepon (Tower telekomunikasi) Pelabuhan Anggrek	1 Paket	-	-	-	Sudah tidak ditemukan
	Instalasi Air Bersih	2 Paket	-	-	2	
	Instalasi Listrik	3 Paket	-	-	3	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Keterangan :

RB = Rusak Berat; RR = Rusak Ringan; B = Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

D. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan otonomi, menggunakan dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengkoordinasikan dan mensupport langsung pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT lingkup Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui dana APBN.

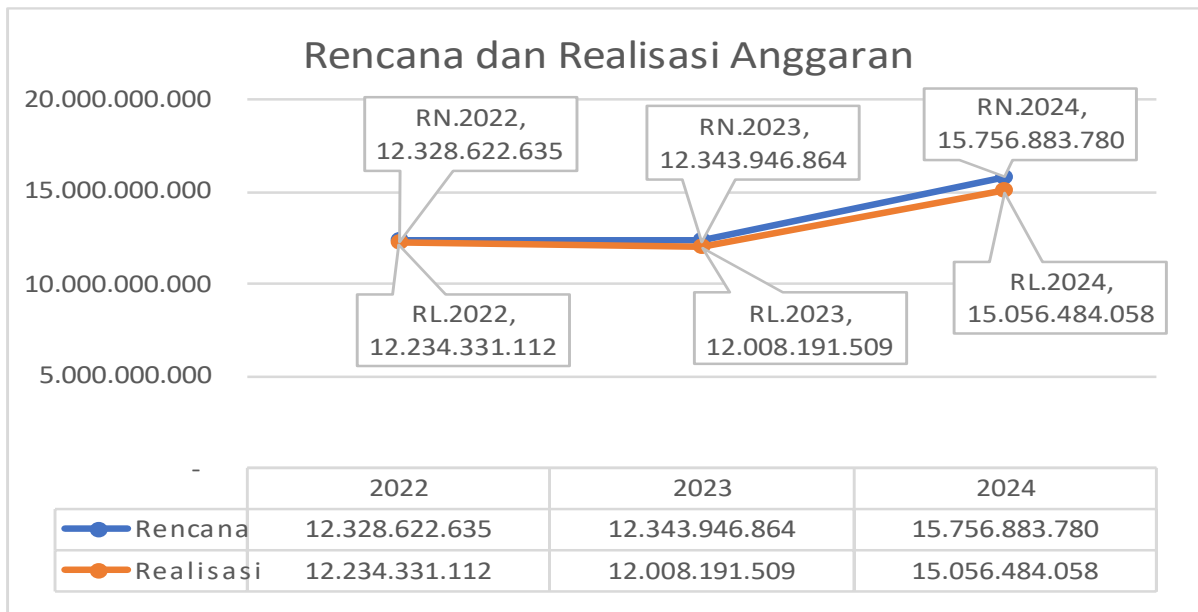
Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui dana APBD dijelaskan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada tahun ke - n			Realisasi pada tahun ke - n			Persentasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
- BELANJA OPERASI	11.031.788.987	10.995.546.864	11.160.625.165	10.997.414.162	10.705.896.509	10.695.425.966	99,69%	97,37%	95,83%
- Belanja Pegawai	5.414.888.698	5.898.004.774	6.383.725.790	5.408.756.232	5.713.997.419	6.152.525.686	99,89%	96,88%	96,38%
- Belanja Barang dan Jasa	5.001.900.289	5.097.542.090	4.776.899.375	4.973.768.930	4.991.899.090	4.542.900.280	99,44%	97,93%	95,10%
- Belanja Hibah	615.000.000	-	-	614.889.000	-	-	99,98%	#DIV/0!	#DIV/0!
- BELANJA MODAL	1.296.833.648	1.348.400.000	4.596.258.615	1.236.916.950	1.302.295.000	4.361.058.092	95,38%	96,58%	94,88%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.296.833.648	1.348.400.000	143.991.913	1.236.916.950	1.302.295.000	134.891.590	95,38%	96,58%	93,68%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	4.452.266.702	-	-	4.226.166.502	#DIV/0!	#DIV/0!	94,92%
Total	12.328.622.635	12.343.946.864	15.756.883.780	12.234.331.112	12.008.191.509	15.056.484.058	99,24%	97,28%	95,55%

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

Grafik 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo



Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, 2025

E. Kinerja Pelayanan OPD

1. Pelayanan Internal OPD

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo kini bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Desa Ayula Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango yang dengan ini diharapkan akan menunjang pelayanan jasa perhubungan. Kemudian dari segi prasarana, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki 14 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat.

Selain prasarana, dalam mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo telah mengusahakan secara bertahap pengadaan komputer dalam rangka persiapan komputerisasi dalam proses administrasi dan sistem informasi. Saat ini, semua komputer sudah terhubung dengan koneksi internet (wifi kantor) yang disupport oleh Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Gorontalo. Pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terdapat pelayanan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu pelayanan izin trayek, pelayanan rekomendasi izin usaha bongkar muat dan pelayanan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan cepat serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan pelayanan prima dan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas sebagai pelaksana pembangunan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan beberapa layanan system informasi tersebut seperti.

a. Aplikasi SAHABAT

(Satu Hari Beres Angkutan Tertib)

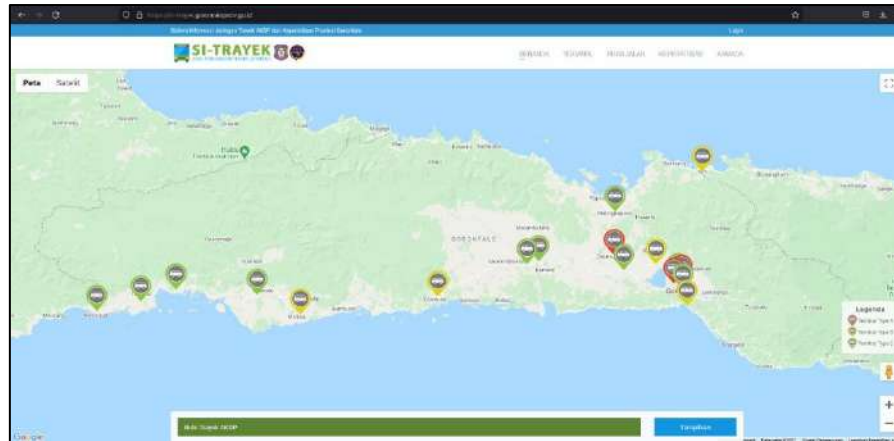
SAHABAT “On-Sight” merupakan Pengembangan Aplikasi SAHABAT (Satu Hati Bangun Transportasi) melalui Pengawasan dari kamera/smartphone untuk mendata status perizinan angkutan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan mengambil gambar plat nomor kendaraan. Untuk mendeteksi peizinan kendaraan yang berizin, atau tidak berizin, sehingga optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan dan penertiban yang dapat menciptakan efektivitas dalam pendataan perizinan.

Dari sisi Pelaporan/Pengaduan SAHABAT “On -Sight” dirancang untuk mempermudah Pengusaha Angkutan dalam mengajukan pengaduan terkait layanan perizinan angkutan umum. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas dalam proses pengaduan. Masyarakat.



b. Aplikasi Si-Trayek

Aplikasi Penyedia Informasi Ketersediaan Jaringan Trayek AKDP Provinsi Gorontalo. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pemilik kendaraan pada pengurusan izin trayek AKDP.



c. Aplikasi SiPeKa



Aplikasi Pelayanan Pengurusan Kartu Pengawasan Angkutan Umum.

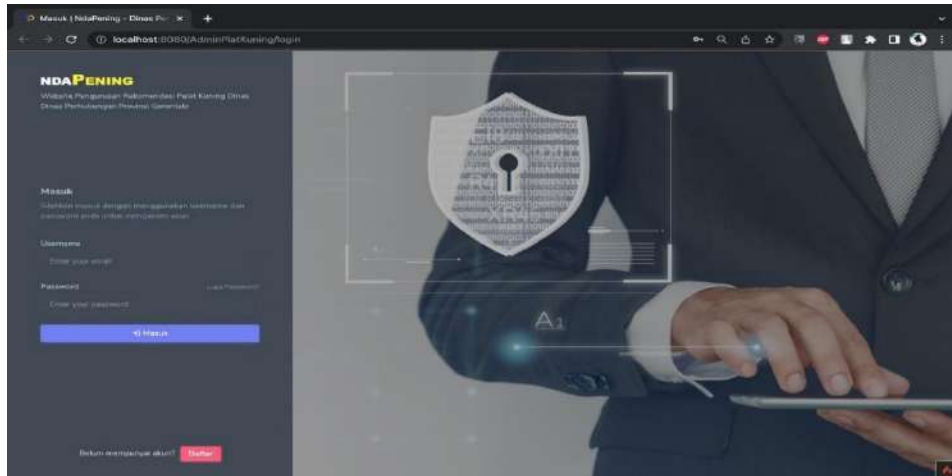
d. Utaeya

Aplikasi Pelayanan Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Trans NKRI Provinsi Gorontalo.



e. NdaPening

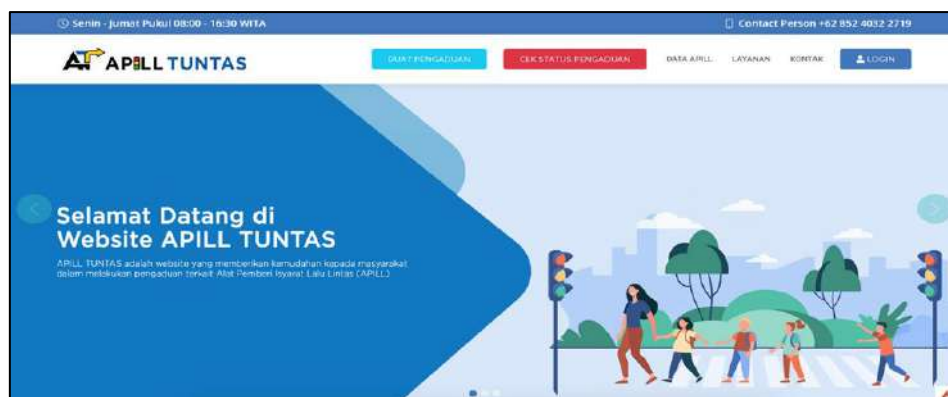
Aplikasi yang dapat mempermudah pengusaha Angkutan barang dalam melakukan pengurusan Rekomendasi pelat kuning agar terjadi peningkatan persentase pengusaha Angkutan barang yang sesuai ketentuan.

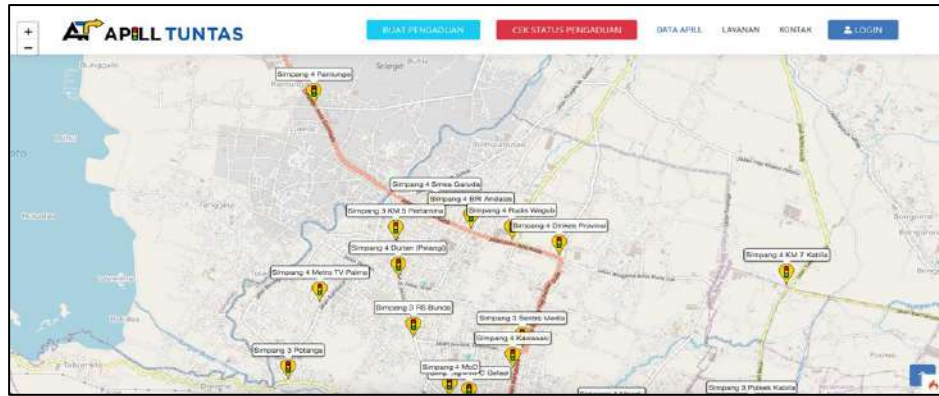


f. APIL TUNTAS

(Optimalisasi Partisipasi masyarakat dalam pelayanan keselamatan lalu lintas di provinsi gorontalo)

Inovasi APILL TUNTAS (Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas) di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Program ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam memantau dan melaporkan pelanggaran atau masalah terkait keselamatan jalan raya melalui platform yang mudah diakses. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam upaya pencegahan kecelakaan dan meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan berlalu lintas. Program ini juga bertujuan mempercepat respon dari pihak berwenang terhadap masalah yang dilaporkan, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan

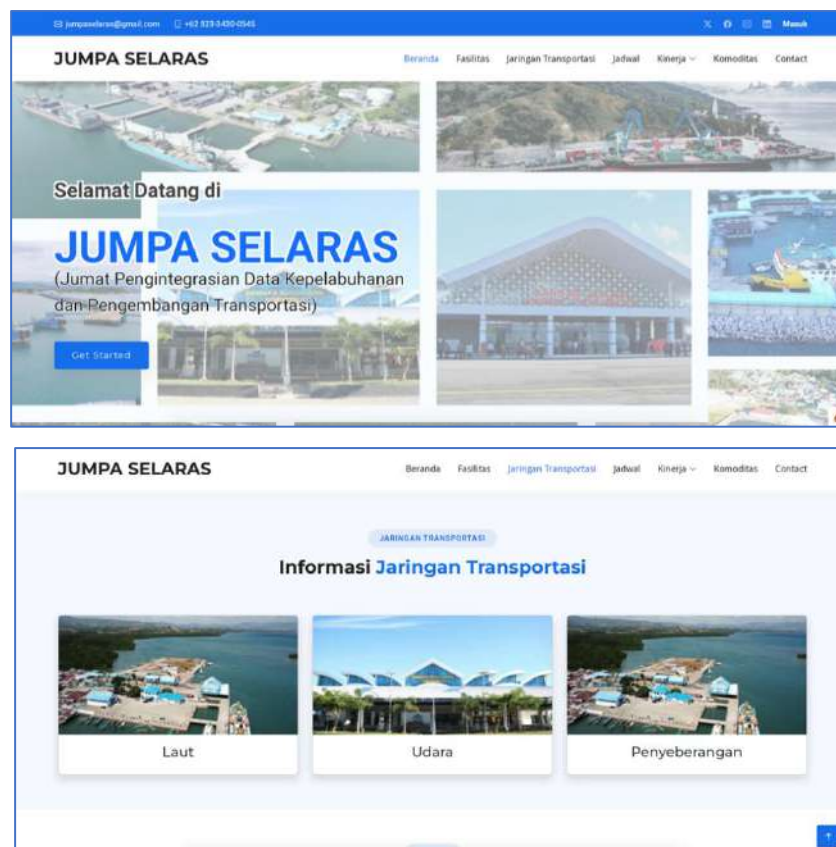




g. Jumpa Selaras

(Jumat Pengintegrasian Data Sektor dan Pengembangan Transportasi)

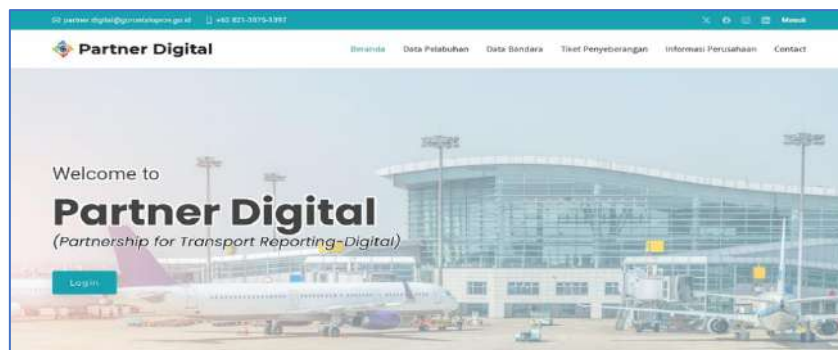
Melalui JUMPA SELARAS maka pada setiap hari Jumat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan RI yang ada di Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kinerja kepada Gubernur Gorontalo sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang selama ini belum dilakukan secara rutin, efektif dan efisien. Dengan dukungan bahan berupa data yang memadai, cepat dan akurat maka Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan infrastruktur sektor perhubungan laut dan udara di Provinsi Gorontalo.



h. Partner Digital

(Partnership For Transport Reporting Digital)

Sebuah Platform layanan pelaporan data aktivitas kepelabuhanan yang selama ini masih menggunakan cara konvensional sehingga memperbesar probabilitas human error pada saat rekapitulasi dan waktu pengumpulan data. layanan digital memangkas kemungkinan permasalahan diatas dengan maksud dan tujuan stakeholders bisa mengirim data secara realtime dan data yg masuk sudah direkap oleh database. data yg direkap juga bisa dilihat untuk masyarakat sebagai bentuk tranaparansi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.



i. KLAKSON

(Kenali Laporkan Arahkan Sopir Kontainer)

Inovasi KLAKSON (Kenali Laporkan Arahkan Sopir Kontainer) adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sopir kontainer. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengenali perilaku sopir yang berpotensi membahayakan atau melanggar aturan lalu lintas, kemudian melaporkannya melalui platform yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, sistem akan mengarahkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan disiplin pengemudi kontainer. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keselamatan lalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan kontainer di jalan raya.



j. SIPD

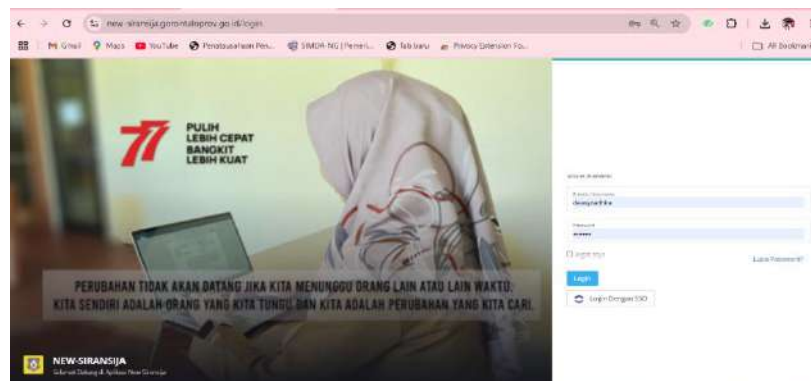
(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.



k. New Siransija

Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).



I. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (E-Monev, E-Sakip, SIMPD, Siransija) dengan alamat akses antara lain <http://e-monev.gorontaloprov.go.id>, <http://esr.menpan.go.id>, <http://sppd.gorontaloprov.go.id>, <http://new-siransija.gorontaloprov.go.id>.

Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



m. Sistem Informasi Metadata Sektor

Sistem Informasi Meta Data Sektor berfungsi untuk memberikan informasi data daerah yang dimiliki Pemda Provinsi Gorontalo secara umum. Meta Data dengan alamat akses <http://e-data-sektor.gorontaloprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data antar pengguna sistem. Sistem Metadata Sektor merupakan sistem yang dibangun oleh Pemda Provinsi Gorontalo sebagai bentuk tanggung jawab atas penyediaan data.



n. SAKLAR

(Sistem Pendataan Kinerja Layanan Terminal)

SAKLAR Merupakan Aplikasi Pendataan Kinerja Layanan Terminal tipe B Limboto melalui system yang terintegrasi dengan perizinan angkutan sehingga Produksi dan Pengawasan Angkutan AKDP dapat di pantau dan diawasi secara langsung (realtime), serta mempermudah masyarakat dalam mencari informasi angkutan di terminal.



o. TILANG AMAN

(Pembuatan Aplikasi Database Hasil Penertiban Angkutan Umum Orang dan Barang)

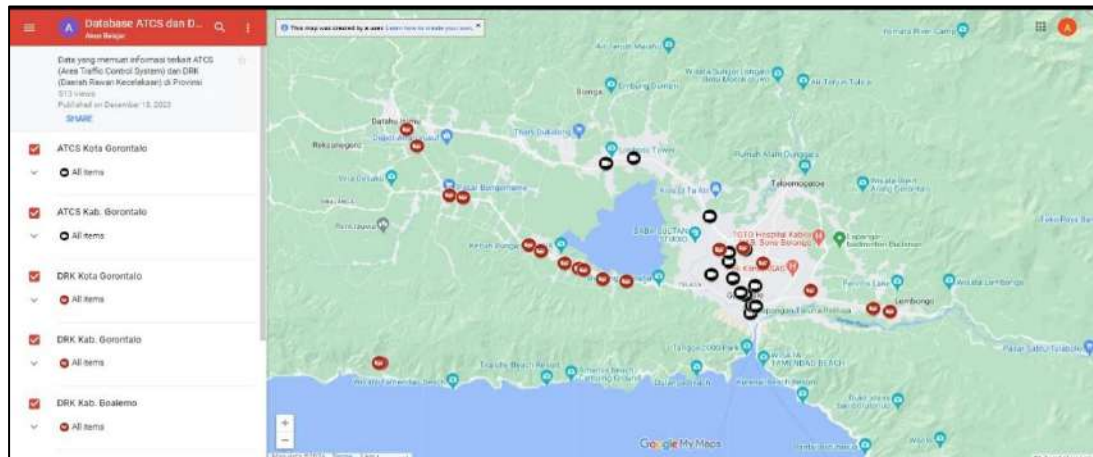
Aplikasi tilang aman yaitu aplikasi yang memuat database terkait dengan hasil penertiban angkutan umum orang dan barang di wilayah provinsi gorontalo. Aplikasi yang membantu memudahkan petugas dalam melakukan pencarian data dan masyarakat apabila ada berkas yang hilang, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.



p. DITRADA

(Digitalisasi Database ATCS (*Area Traffic Control System*) Dan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan)

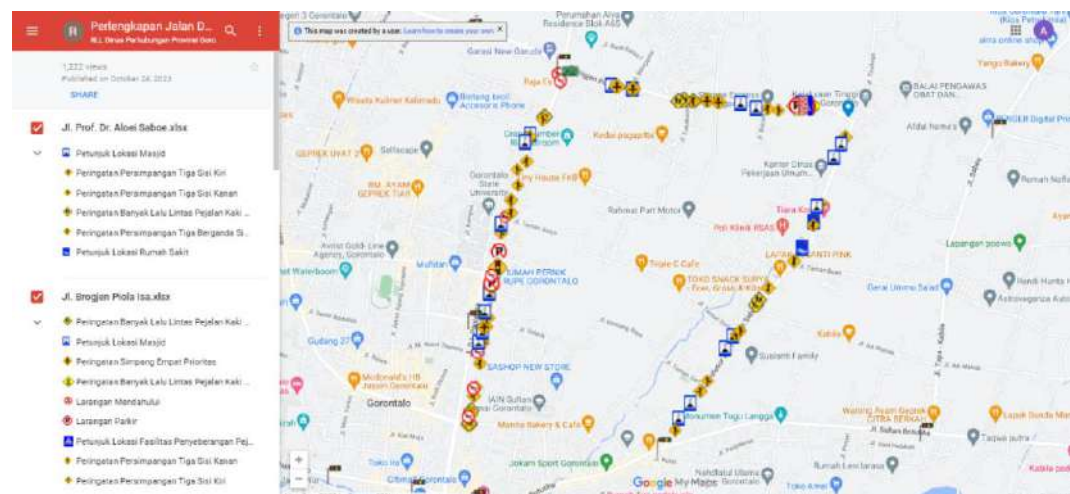
Digitalisasi Database ATCS (*Area Traffic Control System*) dan DRK (Daerah Rawan Kecelakaan) Menggunakan Google My Maps merupakan database digital yang menampilkan titik lokasi serta informasi ATCS dan DRK di sepanjang ruas jalan provinsi yang dapat diakses publik melalui web resmi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.



q. Mata Elang

(optiMAlisasi daTAbase pErlengkapan jaLAn dengan menggunaan Google my maps)

Merupakan sistem informasi titik lokasi perlengkapan jalan eksisting maupun yang akan direncanakan melalui website sehingga mempermudah dalam pendataan maupun pemantauan tanpa perlu turun langsung dilokasi.



2. Pelayanan Eksternal OPD

Pada pelayanan eksternal OPD selain difokuskan pada capaian target yang di capai Dinas Perhubungan selang 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indicator Target yang ditetapkan dalam IKU dan Penetapan Kinerja setiap tahun

Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

No	Indikator	Data Capaian pada tahun awal	Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Ket
			2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
A	PERHUBUNGAN							
1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
2	Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
3	Rasio dukungan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
4	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
5	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) per 1000 keberangkatan	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	0 (Zero Accident)	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
6	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi	48,59%	48,59%	48,59%	48,59%	48,59%	48,59%	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
7	Nilai SAKIP	A (82,36)	A (80 - 90)	A (82,66)	A (80 - 90)	A ()	A ()	Target tercapai sesuai Tahun Rencana
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Target tercapai sesuai Tahun Rencana

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Dinas Perhubungan sudah tercapai di semua indikator yang menjadi sasaran strategis yang telah ditetapkan seperti rasio konektivitas darat, rasio konektivitas transportasi aglomerasi (BRT), presentase perlengkapan jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi, Rasio dukungan konektivitas laut dan udara dan beberapa target indikator lainnya, untuk selanjutnya data tersebut menjadi baseline data indikator dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2025 – 2029. Terkait dengan pelayanan ekesternal perhubungan terhadap masyarakat maka dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan Transportasi Darat



Infrastruktur transportasi sejak berdirinya Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan yang signifikan terutama pada infrastruktur jalan dan jembatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Gorontalo, kondisi jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi yang ada di Provinsi Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut adapun detail jalan Provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.6 : SK Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 383 / 18 / XI / 2017 TANGGAL : 27 November 2017 TENTANG : PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DAN JALAN STRATEGIS PROVINSI DI PROVINSI GORONTALO						
A. Daftar Jalan Provinsi						
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (Km)	Jalan Provinsi (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)
	(1)	(2)	(3)			
1	001	Isima - Darudaa	14,58	7	JP	
2	002	Batuada - Gorontalo	3,11	7	JP	
3	003	1 K Jl. Hasanudin	0,33	7	JP	
4	002	2 K Jl. Raja Eyoato	2,09	9	JP	
5	002	3 K Jl. Usman Ikhwan	6,90	4,5-7	JP	
6	005	Gorontalo - Suwawa - Tulabolo	23,48	8	JP	
7	003	1 K Gorontalo - Suwawa - Tulabolo	3,50	4,5	JP	
8	004	Aledi - Tulabolo	20,00	4,5	JP	
9	005	Kabila - Tapa	9,50	4,5	JP	
10	006	1 K Jl. Tolo utara	1,10	5	JP	
11	007	Tapa - Atinggola	45,00	4-9	JP	
12	007	1 K Jl. Cokroaminoto	0,60	6	JP	
13	007	2 K Jl. Ahmad Dahlan	1,20	6	JP	
14	007	3 K Jl. Pangeran Hidayat	1,74	2 x 6	JP	
15	007	4 K Jl. Rudi Darus	1,98	6	JP	
16	008	1 K Jl. Kamboja	0,91	4	JP	
17	011	Tangobu - Perastu	55,00	3-4	JP	
18	013	Duhiyasa-Imbodu	16	7	JP	
19	014	Molombakala-Bubua	18	4,5	JP	
20	015	1 K Jl. Prof. Jhon A. Kasli	2,7	2 x 7	JP	
21	016	1 K Jl. Moh. Tayeb Gobel	4,5	6-7	JP	
22	017	1 K Jl. Brigjen polda tan	2,3	6	JP	
23	018	1 K Jl. Prof. Dr. Alori Saeboe	2,8	6	JP	

24	019	Jl. Tinaboga	4,5	4,5	JP	
25	020	1 K Jl. Tenlio-pilobada-Ituta	7,2	7	JP	
26	001	1 K Jl. Akasa perkantoran bonu	3,46	9-11	JP	
27	022	1 K Jl. Talamulo-Buata-Duana	55	4,5	JP	
28	023	Jl. Bafu-kangalo-dolemano	38	4	JP	
29	024	Jl. Saleh Kadri (Hinggalawa-Iduwalabola)	2,7	7	JP	
30	025	Jl. Panggalaa-baki	13,46	4,5	JP	
31	025	Jl. Pitalingga-Bihahu Tengah	20,5	4,5	JP	
32	027	Jl. Malyangoro Karya Mukti	14	4	JP	
33	028	Jl. Rani Kemoro (Pongopale-Buhui)	11,64	4	JP	
34	029	Jl. Pitaliyanga-Dulamayo-Bakelan	39	4	JP	
35	030	Jl. Pantaha-Maunagga	39	4	JP	
36	031	Jl. Labano-Talanga	9,2	4	JP	
37	032	Jl. Temtai-Siptama	3,51	4	JP	
38	033	Jl. Imboda-Puilangga	0,8	4	JP	
39	034	Jl. Tahudi-Wanggara	23,4	4	JP	
40	035	Jl. Akasa-Bantara-Imbodu	10,75	4	JP	
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI			467,17			

B. Jalan Strategis Provinsi						
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (Meter)	Status Jalan	Jalan Strategis Provinsi (JSP)
	(1)	(2)	(3)			
1	036	Trans Tomotira	6,29	4,5	JSP	
2	037	Papaya Karya Baru	7,72	4,5	JSP	
3	038	Wanggaha Serinani	35	4,5	JSP	
4	039	Bongu Hot-Bongu 1	11,5	4	JSP	
5	040	Tabulu Karangtana	22	4	JSP	
6	041	Modikana Perastu-Timur	4,5	4	JSP	

7	042	Pitaliyanga-Tangga Jaya	20	4	JSP	
8	043	Parungi-Sidomulyo	5	4	JSP	
9	044	Lakya-Sidemulyo	15,10	4	JSP	
10	045	Hinggalawa-Daerana-Ombalo (Jl. Hira Dumnggi-Jl. Amal Medjo)	15,50	4	JSP	
11	046	Poso-Pakoku	6	4	JSP	
12	047	Tolinggula Ulu-Cempaka Putih	6	4	JSP	
13	048	1 K Jl. Palma	7,03	14	JSP	
14	049	1 K Jl. Beringin	3	4	JSP	
15	049	2 K Beringin Temggala (Jl. Jodoh)	2	4	JSP	
16	050	Wongkaditu,Talanga,Obihuta	3	4	JSP	
17	051	1 K Siendeng-Jl. Kancil-Raja Eyoato	5	4	JSP	
18	052	Jl. Inspekti Tapa-Baidu	0,8	4	JSP	
TOTAL PANJANG JALAN STRATEGIS PROVINSI			176,44			

Keterangan :
 (1) = Nomor Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
 (2) = Kode angka yang menunjukkan segmen ruas jalan provinsi yang melintasi kawasan perkotaan.
 (3) = Kode 'K' artinya ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi yang melintasi kawasan perkotaan.

Dari Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa dari ruas jalan provinsi sebanyak 40 ruas jalan dan ruas jalan strategis provinsi sebanyak 18 ruas jalan, sampai dengan tahun 2025 sebanyak ruas jalan yang telah terpasang fasilitas LLAJ seperti Tabel di bawah ini, dimana rencana pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ 5 (lima) tahun ke depan di fokuskan pada ruas jalan yang diperlukan penanganan serius dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini selaras dengan salah satu indikator sesuai Inmen No 2 Tahun 2025 yaitu Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Jalan Provinsi

Tabel 2.7 : Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ yang terpasang pada Ruas Jalan Provinsi Sd Tahun 2025

No	Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (M)	Marka Jalan			Rambu Lalu Lintas			APILL			Warning Light			LPJU			Guardrail			RPPJ			Cermin Tikung			ZOSS			Pita Penggaduh			KET				
				Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	Keb (m)	Sisa	Existing	Keb	Sisa	Existing	keb	Sisa	Existing	keb	Sisa	Existing	keb	Sisa								
1	Isimu - Batudaa	14,38	7		14,380	132	160	28	2	2	0		2	2	0	14	18	4				2	2	0	1	3	2	5	7	2	1	4	3					
2	Batudaa - Gorontalo	5,11	7		5,110	5	20	15			0				0					500	500			0	1	4	3											
3	Jl. Usman Isa	6,90	4,5 - 7		6,900	28	42	14			0				0									4	4	0		2	2									
4	Jl. Hasanudin	0,35	7		350	0	6	6			0				0																							
5	Jl. Raja Eyato	2,00	9		2,000	34	34	0	1	1	0				0								1	1					0	2	2	0						
6	Gorontalo - Suwawa - Tulabolo	26,98	4,5 - 8		26,980	74	129	55	1	1	0				0				660	1273	613			8	1		4	4		1	1	3	6	3				
7	Alaji - Tulabolo	30	4,5		30,000						0				0																					Bim ada survey		
8	Randanan - Taloditi	30,00	4,5		30,000	110	140	30			0				0				244	680	436			14	14	0												
9	Kabilia - Tapa	9,50	4,5		9,500	29	51	22	1	1	0				0					840	840			4	4	0						1	1	0				
10	Jl. Toto Utara	1,10	4,5		1,100	0	4	4			0				0																							
11	Tapa - Alingola	45	4 - 9		45,000						0				0																						Bim ada survey	
12	Jl. Cokroaminoto	0,60	6		600	0	17	17	1	1	0				0																							
13	Jl. Ahmad Dahlan	1,20	6		1,200	0	4	4			0				0																							
14	Jl. Pangeran Hidayat	1,74	2 x 6		1,740	16	16	0			0				0																1	1	0					
15	Jl. Rusli Datau	1,98	6		1,980	12	30	18			0				0																							
16	Jl. Kamboja	0,91	4		910	0	3	3	1	1	0				0																							
17	Tangkobu-Pentadu	55,00	3 - 4		55,000		89	89			0			26	26																							Bim ada survey
18	Duhiyadaa - Imbodu	16,00	7		16,000	106	118	12			0			89	89	0																					Naik status Jl. Prov menjadi Jl. Nasional	
19	Molombulaha - Bubaa	18,00	4,5		18,000	0	92	92	1	1	0			104	104								4	4									4	4				
20	Jl. Anyo Kallii (Ex Jln Andalas)	2,70	2 x 7		2,700	18	36	18	4	4	0												1	1							4	4	2					
21	Jl. Thayeb Moh. Gobel	4,50	6 - 7		4,500	39	43	4			0												2	2							4	4	3	3	0			
22	Jln. Brigjen Piola Isa	2,30	6		2,300	26	26	0			0												1	1	0					1	1	1	1	0				
23	Jln. Prof Dr. Aloei Saboe	2,80	6		2,800	22	22	0			0				0																							
24	Jln. Tinaloga	4,50	4,5		4,500	11	11	0			0				1	1	0																					
25	Jln. Tenilo - Pilolodaa - Iluta	7,20	7		7,200						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
26	Jln. Akses Perkantoran Botu	3,46	9 - 11		3,460	34	34	0			0		1	3	2								2	2														
27	Talumolo - Buata - Duano (Botupingge)	25,00	4,5		25,000	64	64	0			0				0																							
28	Jln. Boidu - Longalo - Dulamayo	18,00	4		18,000	60	60	0			0				0																							
29	Jln. Saleh Kadir (Hunggaluwa - Dehuwalolo)	3,70	7		3,700						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
30	Jln. Pangadaa - Bakti	13,46	4,5		13,460						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
31	Jln. Pilolalenga - Biluhu Tengah	20,50	4,5		20,500						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
32	Jln. Mulyonegoro - Karya Mukti	14,00	4		14,000						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
33	Jln. Runi Hemeto (Pongogaila - Buhu)	11,64	4		11,640						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
34	Jln. Pilohayanga - Dulamayo Selatan	10,00	4		10,000						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
35	Jln. Pentadu - Mananggu	39,00	4		39,000						0			52	52																							Bim ada survey keseluruhan
36	Jln. Labanu - Tolongio	9,20	4		9,200						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
37	Jln. Teratai - Sipatana	3,51	4		3,510						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
38	Jln. Imbodu - Patilanggio	0,80	4		800						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
39	Jln. Taluditi - Wonggarasi	23,40	4		23,400						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
40	Jln. Akses Bandara Imbodu	10,75	4		10,750						0				0																							Bim ada survey keseluruhan
JUMLAH		497	166	0	497,170	820	1,251	431	12	12	0	6	8	2	103	289	186	904	4,434	3,530	28	42	14	6	18	12	5	19	14	17	27	12						
				Marka Jalan	Rambu Lalu Lintas	APILL			Warning Light			LPJU			Guardrail			RPPJ			Cermin Tikung			ZOSS			Pita Penggaduh											
				(%)	(%)	(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)														
				0.00	65.55	100.00			75.00			35.64			20.39			66.67			33.33			26.32			62.96											
				TOTAL PENCAPAIAN (%)				48.59																														

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov Gorontalo

Dari segi sarana transportasi, pertumbuhan kendaraan menunjukkan angka yang signifikan, sekarang dimana yang paling besar pertumbuhannya sangat pesat di beberapa ruas jalan mengalami kemacetan yang berdampak pada arus lalu lintas, berikut hasil analisa Kinerja Simpang dan Kinerja Ruas di beberapa ruas jalan Provinsi. Dengan tingkat derajat kejenuhan (DS) beberapa simpang belum melebihi angka 0.8.

Tabel 2.8 Hasil Analisis Kinerja Simpang dan Kinerja Ruas sampai Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo

No	VC Rasio	Keterangan	Ruas Jalan
1.	0,5 – 0,74 (hijau)	Arus lalu lintas stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan mulai terganggu dengan kecepatan dan gerakan kendaraan lain. Gerakan tersebut berupa perpindahan lajur dan perlambatan kecepatan.	a. Jl. Rusli Datau (0,71) b. Jl. Piola Isa (0,63) c. Jl. Sultan Botutihe (0,56) d. Jl. D.I. Panjaitan (0,52) e. Jl. Ahmad A. Wahab (0,68) f. Jl. Andalas (0,64)
2.	0,75 – 0,99 (kuning)	Arus mulai tidak stabil dan mendekati kapasitas ruas jalan. Kecepatan terkadang terhenti.	a. Jl. HOS Cokroaminoto (0,80) b. Jl. Jend. Sudirman (0,94) c. Jl. Prof. Dr. H.B. Jassin (0,90)
3.	≥ 1,00 (merah)	Arus lalu lintas melebihi kapasitas dan terjadi antrean panjang (macet).	Pada pemodelan Kota Gorontalo, warna merah ditunjukkan pada segmen jalan di beberapa simpang sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persilangan arus lalu lintas yang tinggi berasal dari ruas-ruas jalan terhubung.

Sumber : Kajian Studi Manajemen Rekayasa LLAJ Lintas Tahun 2023

Provinsi Gorontalo adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi, yang pertumbuhan ekonominya cukup signifikan begitu juga dengan pertumbuhan disegi transportasi. Banyak daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan karena minimnya rambu lalu lintas yang terpasang di daerah tersebut. Berikut data kecelakaan lalu lintas yang terjadi 5 tahun terakhir.

Tabel 2.9 Data Kecelakaan di Provinsi Gorontalo

NO	KASUS	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
	<i>JUMLAH KEJADIAN LAKA</i>	<i>382</i>	<i>392</i>	<i>415</i>	<i>320</i>	<i>564</i>	<i>2073</i>
1	MENINGGAL DUNIA	85	90	77	93	103	448
2	LUKA LUKA	528	553	670	439	599	2789
TOTAL		613	643	747	532	702	3237

Sumber Data : Jasa Raharja Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data kecelakaan diatas terlihat bahwa angka kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 564 kasus. Sebaliknya, angka terendah tercatat pada tahun 2023 yakni sebanyak 320 kasus. Meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun, secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah kecelakaan menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian serius. Peningkatan yang signifikan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan serta implementasi kebijakan keselamatan yang lebih efektif. Kedepannya masih banyak yang harus diperbaiki dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan dibutuhkannya pemasangan rambu – rambu lalu lintas di ruas jalan strategis.

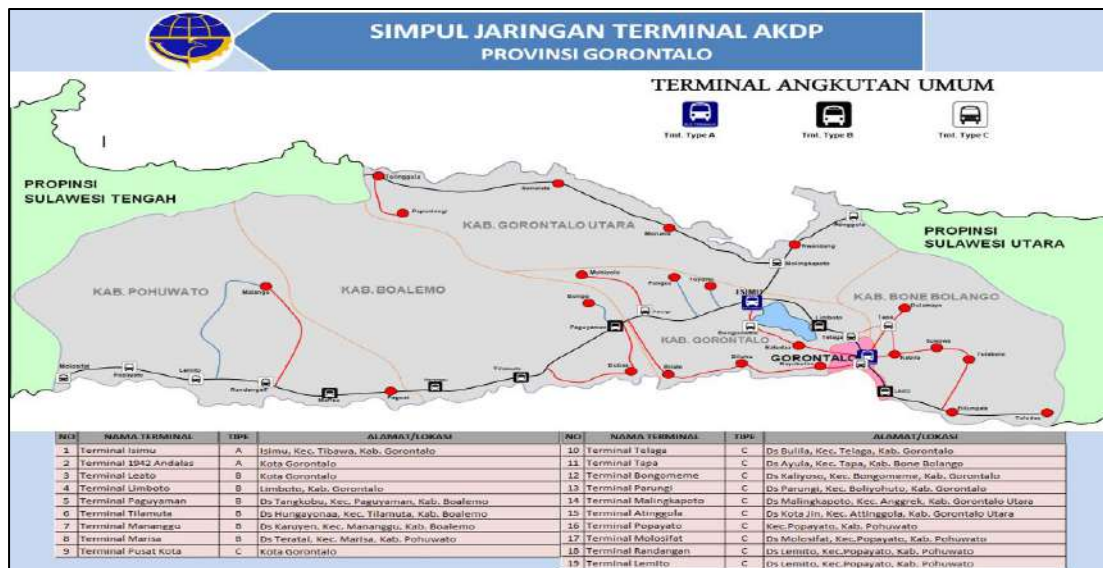
Untuk mendukung arus lalu lintas barang dan orang, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yaitu Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi angkutan orang dan / atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Terkait dengan hal tersebut, di Provinsi Gorontalo saat ini terdapat sarana berupa terminal sebagai simpul jaringan jalan yang dilayani oleh sistem jaringan angkutan orang dalam trayek. Terminal ini terbagi menjadi 3 kategori yakni Terminal Tipe A yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Terminal Tipe B yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Terminal Tipe C yang melayani trayek lokal dari ibukota Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan Desa di wilayahnya masing-masing. Saat ini Provinsi Gorontalo terdapat 2 unit Terminal Tipe A yang dikelola oleh Balai Transportasi Darat Kelas II Provinsi Gorontalo, 1 unit Terminal Tipe B yang dalam saat ini dalam proses Pembangunan yaitu Terminal Tipe B Limboto dan direncanakan ada 4 Terminal lagi yang akan dikelola oleh Provinsi Gorontalo apabila telah dilakukan penyerahan aaset dari Pemda Kab/Kota, dan 11 unit Terminal Tipe C yang dikelola oleh Kabupaten/Kota.

Perlu diakui bahwa banyak kendala terkait pengoperasian terminal-terminal tersebut diantaranya belum adanya fasilitas terminal yang representatif dan juga terkait penetapan status Terminal Tipe B dan Tipe C yang hingga saat ini belum

ada. Dilihat dari kewenangan pengoperasian, maka sesuai UU No 23 Tahun 2014 maka yang berwenang untuk melaksanakan pengoperasian terminal tipe B ini adalah Pemerintah Provinsi. Sampai tahun 2022 baru 1 (satu) Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto yang pada tahun 2025 ini dalam tahap Pembangunan Tahap II

Lokasi terminal dan trayek yang dilayani oleh masing-masing terminal tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.2 Lokasi Terminal di Provinsi Gorontalo



Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Tabel 2.10 Data Terminal di Provinsi Gorontalo

NO	NAMA TERMINAL	TIPE	KAB/KOTA	ALAMAT/LOKASI	TELP/FAX	WEBSITE/E-MAIL	LUAS (m ²)	KETERANGAN
1	Terminal Bus Isimu	A	Kab Gorontalo	Kel. Datahu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo	(0435) 881244, 882364	tidak ada	25.830 m2	
2	Terminal Dungi	A	Kota Gorontalo	Kel. Huangobotu, Kec. Dungi Kota Gorontalo	(0435) 8532847	tidak ada	39.000 m2	
3	Terminal Leato	B	Kota Gorontalo	Kel. Leato Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo	(0435) 821163	tidak ada	60 m x 100 m	
4	Terminal Tilamuta	B	Kab. Boalemo	Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	(0443) 210726	tidak ada	60 m x 70 m	
5	Terminal Marisa	B	Kab. Pohuwato	Desas Teratal, Kec. Marisa Kab. Pohuwato	Belum terpasang	tidak ada	60 m X 40 m	
6	Terminal Telaga	B	Kab. Gorontalo	Desa Bulifa, Kec. Telaga Kab. Gorontalo	(0435) 881244	tidak ada	40 m X 50 m	
7	Terminal Atinggola	B	Kab. Gorontalo Utara	Desa Kota Jin, Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara	(0442) 310170	tidak ada	20 m X 40 m	
8	Terminal Limboto	C	Kab. Gorontalo	Kel. Kayu Bulan, Kec. Limboto Kab. Gorontalo	(0435) 881244	tidak ada	90 m x 100 m	
9	Terminal Paguyaman/Tangkobu	C	Kab. Boalemo	Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	(0443) 210726	tidak ada	90 m x 100 m	
10	Terminal Manangu	C	Kab. Boalemo	Desa Karuyen, Kec. Manangu Kab. Boalemo	(0443) 210726	tidak ada	50 m x 60 m	
11	Terminal Popayato	C	Kab. Pohuwato	Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	Belum terpasang	tidak ada	80 m X 100 m	
12	Terminal Randangan	C	Kab. Pohuwato	Desa Lemito, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	Belum terpasang	tidak ada	60 m X 100 m	
13	Terminal Pusat Kota	C	Kota Gorontalo	Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	(0435) 8703620, 821163	tidak ada	60 m X 100 m	
14	Terminal Tapa	C	Kab. Bone Bolango	Desa Ayula, Kec. Tapa Kab. Bone Bolango	(0435) 821163	tidak ada	20 m X 40 m	
15	Terminal Bongomeme	C	Kab. Gorontalo	Desa Kallyoso, Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo	(0435) 881244	tidak ada	20 m X 40 m	
16	Terminal Parungi	C	Kab. Gorontalo	Desa Parungi, Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo	(0435) 881244	tidak ada	20 m X 40 m	
17	Terminal Malingkapoto	C	Kab. Gorontalo Utara	Desa Malingkapoto, Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	(0442) 310170	tidak ada	20 m X 40 m	
18	Terminal Molosifat	C	Kab. Pohuwato	Desa Molosifat, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	Belum terpasang	tidak ada	100 m X 100 m	
19	Terminal Lemito	C	Kab. Pohuwato	Desa Lemito, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	Belum terpasang	tidak ada	20 m X 40 m	

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Untuk melayani angkutan orang dalam trayek di Provinsi Gorontalo, maka terdapat 33 jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang dilayani armada angkutan sebanyak 883 unit armada angkutan AKDP. Saat ini para pengusaha angkutan telah mudah dalam mengurus izin pengurusan kartu pengawasan sudah bisa dengan aplikasi SiPeKa “Sistem Pelayanan Kartu Pengawasan AKDP”

Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini perkembangan trayek armada angkutan AKDP 5 tahun terakhir.

Tabel 2.11 Jumlah mobil Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

No	BADAN Usaha	Alamat	Jumlah Angkutan Umum AKDP							Ket	
			Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024		% Pertumbuhan
1	KSU TETAP SETIA BHAYANGKARA	Kab/Kota Prov. Gorontalo	254 Unit	361 Unit	392 Unit	407 Unit	410 Unit	405 Unit	402 Unit	(0,01)	Mikrolet
2	KJA KRAWANG JAYA BERSAMA	Kota Gorontalo	2 Unit	25 Unit	32 Unit	41 Unit	46 Unit	53 Unit	58 Unit	0,09	Mikrolet
3	KSU CITRA	Kab. Boalemo	30 Unit	34 Unit	34 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	-	Mikrolet
4	KSU ANUGRAH WIRA USAHA	Kab. Bone Bolango	26 Unit	20 Unit	17 Unit	17 Unit	16 Unit	15 Unit	15 Unit	-	Mikrolet
5	PERUM DAMRI GORONTALO	Kota Gorontalo	15 Unit	15 Unit	15 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	Mikrobus
6	KOPERASI MITRA USAHA NENGGGA	Kota Gorontalo	8 Unit	7 Unit	7 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	-	Mikrolet
7	KJA SINAR MANDIRI SENSEI	Kab. Pohuwato	2 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	Mikrolet
8	KSU NUR AIN	Kab. Gorontalo Utara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	Mikrolet
9	KSU TOMINI BAHARI GORONTALO-TKPPG	Kota Gorontalo	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	Mikrolet
10	PT. CAHAYA CIPTA NUR AIN	Kab. Gorontalo	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	Mikrolet
11	BUMDES SEMANGAT BARU	Kab. Pohuwato	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	Mikrobus
12	PT. PIONER SEJAHTERA ABADI	Kota Gorontalo	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	Mikrobus
13	BUMDES HARAPAN BERSAMA	Kab. Pohuwato	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrobus
14	BUMDES HARAPAN KITA	Kab. Pohuwato	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrobus
15	BUMDES MAJU BERSAMA	Kab. Pohuwato	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrobus
16	BUMDES PANUA MANDIRI	Kab. Pohuwato	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrobus
17	KSU MANUR RAMDAN JAYA	Kab. Gorontalo	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrobus
18	KSU MEKAR JAYA	Kota Gorontalo	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	Mikrolet
Jumlah AKDP Aktif Dalam Badan Usaha			356 Unit	488 Unit	523 Unit	537 Unit	543 Unit	543 Unit	545 Unit		
Jumlah AKDP Aktif Yang Belum Bergabung Dalam Badan Usaha			450 Unit	333 Unit	310 Unit	308 Unit	308 Unit	309 Unit	313 Unit		
Total AKDP Dalam Pengawasan (MEMILIKI IZIN TRAYEK)			806 Unit	821 Unit	833 Unit	845 Unit	851 Unit	852 Unit	858 Unit	0,01	
Jumlah AKDP dalam proses pengurusan izin trayek			12 Unit	12 Unit	24 Unit	17 Unit	28 Unit	28 Unit	25 Unit		
TOTAL AKDP			818 Unit	833 Unit	857 Unit	862 Unit	879 Unit	880 Unit	883 Unit		

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Merujuk aturan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, serta KM Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, maka pengusaha angkutan yang melayani trayek-trayek tersebut wajib memiliki dokumen angkutan (Izin trayek dan Kartu Pengawasan). Izin trayek dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Satu Pintu dimana sebelumnya harus memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Pada tahun selanjutnya salah satu indikator sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 adalah jumlah perusahaan

angkutan umum yang tersertifikasi system manajemen keselamatan diharapkan menjadi indikator dalam pelaksanaan pengawasan angkutan untuk meminimalisir terjadinya ODOL dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan umum

Berdasarkan data yang ada saat ini, diketahui bahwa banyak pengusaha angkutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disampaikan di atas dimana terdapat 188 pengusaha yang sudah memiliki izin AKAP yang sudah sesuai ketentuan. Olehnya dibutuhkan pemantauan secara berkala melalui operasi lalu lintas bekerja sama dengan Kepolisian Daerah serta Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Selain upaya tersebut, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemantauan dan penataan kinerja angkutan maka perlu kiranya dikembangkan optimalisasi proses perizinan dengan menggunakan teknologi informasi. Berikut tabel rekap data pengusaha yang sudah memiliki izin.

Tabel 2.12 Rekapitulasi data angkutan AKAP
(Antar Kota Antar Provinsi) Provinsi Gorontalo

REKAP DATA ANGKUTAN AKAP		
NO		JUMLAH
1	BAHAGIA EXPRESS	5
2	RAJAWALI INDAH EXPRESS	5
3	TRANS GORONTALO INDAH	3
4	BINTANG TERANG	6
5	JAYA INDAH	4
6	BARCELONA	3
7	BONE RAYA TRANS	7
8	HASANAH	5
9	CANTIKA MARCEL TRANS	14
10	PERUM DAMRI	5
11	VERNANDO	2
JUMLAH		59

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Selain armada yang melayani angkutan orang dalam trayek (AKDP) dan AKAP terdapat beberapa daerah yang tidak di layani oleh angkutan umum reguler yaitu daerah sentra produksi, terisolir, terpencil, dan layanan sekolah dimana lokasi tersebut berdampak dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengendalian Inflasi, mendorong peningkatan APM / APK, menunjang pelayanan masyarakat yang berada di daerah terpencil dan sentra produksi untuk memasarkan hasil produksi bahan pokok ke kota maupun ke daerah lain dengan biaya yang terjangkau, disamping itupula sebagai sarana

masyarakat terutama siswa menuju ke lokasi sekolah yang berada di pusat – pusat pendidikan. Untuk melayani angkutan perintis angkutan jalan provinsi dikeluarkan SK Gubernur Gorontalo Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis Tahun 2025. Berikut merupakan data lintasan angkutan perintis :

Tabel 2.13 Data Lintasan Perintis Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo

NO	LINTASAN	JARAK (KM)
1	Terminal Isimu - Kecamatan Boliyohuto	33
2	Terminal Mananggu - Terminal Tilamuta	32
3	Terminal Isimu - SMKN 1 Pulubala - SMAN 1 Pulubala Kab. Goror	22
4	Desa Sidomukti - SMAN 1 Boliyohuto Kab. Gorontalo	20
5	Terminal Duingi - Tapa - Mongiilo	20

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Tabel 2.14 Nama sekolah yang dilayani oleh angkutan perintis

NO	LOKASI	JUMLAH ARMADA
1	SMA NEGERI 1 BILUHU KAB. GORONTALO	1 ARMADA
2	SMK NEGERI 1 BONE RAYA & SMAN 1 BONE KAB. BONE BOLANGO	1 ARMADA
3	SMAN 4 GORONTALO UTARA KAB. GORONTALO UTARA	1 ARMADA
4	SMK NEGERI 1 TALUDITI KAB. POHUWATO	1 ARMADA
5	SMK NEGERI 1 WANGGARASI	1 ARMADA

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

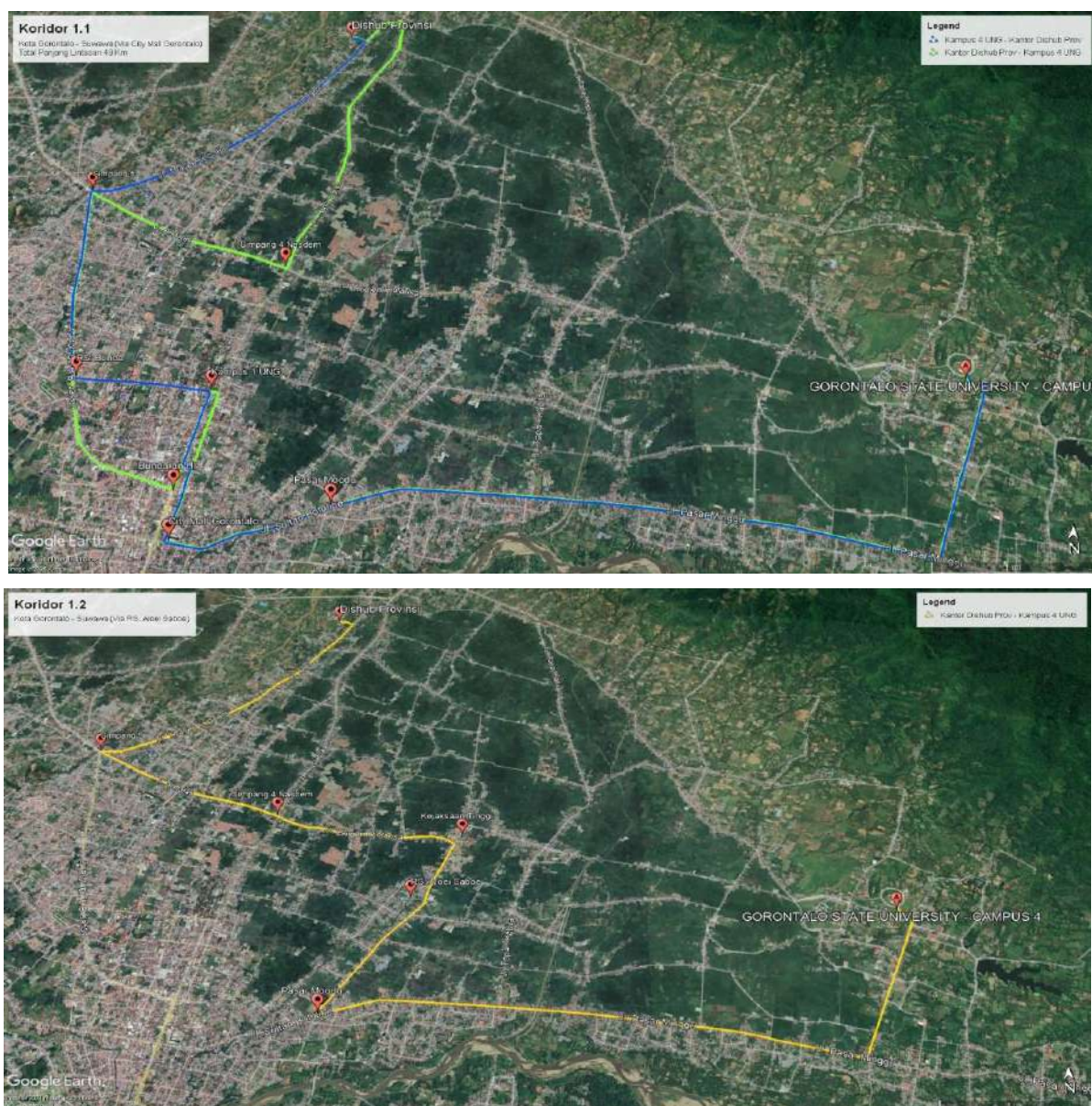
Sedangkan untuk wilayah perkotaan di Provinsi Gorontalo yang merupakan pusat pendidikan pemerintahan dan perdagangan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, maka sebagai moda pendukung transportasi mahasiswa BRT Trans NKRI adalah solusi layanan angkutan perkotaan di Provinsi Gorontalo, melayani 2 sub koridor dengan jumlah armada sebanyak 4 (empat) unit seperti yang terlihat pada tabel dan rute berikut ini:

Tabel 2.15 Layanan angkutan aglomerasi BRT

No	Rute Layanan Angkutan Aglomerasi BRT	Ket
1	Koridor 1.1 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via City Mall) Talumolo – Botupingge – Tamalate (SMAN 5 Kota Gorontalo – Jln Sultan Botutihe – Ipilo (SMAN 1 dan SMAN 8 Kota Gorontalo)	
2	Koridor 1.2 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via RS. Aloe Saboe)	
	Rute Tambahan : Botubarani – Leato – Talumolo – Botupingge – Tamalate (SMAN 5 Kota Gorontalo – Jln Sultan Botutihe – Ipilo (SMAN 1 dan SMAN 8 Kota Gorontalo)	

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Gambar 2.3 Lintasan Layanan Angkutan Aglomerasi BRT



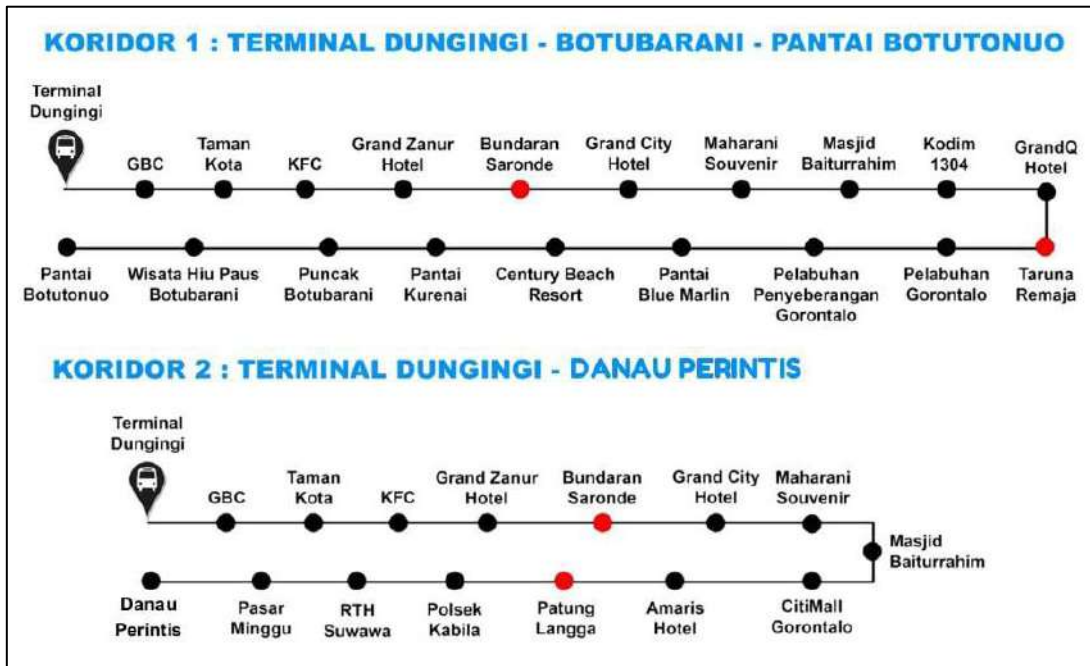
Dalam upaya menyukseskan program Pariwisata, Pemerintah Provinsi Gorontalo hadir dengan memberikan subsidi Operasional Layanan Angkutan Menunjang Obyek Wisata Unggulan, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata meningkat. Berikut trayek layanan angkutan wisata tahun 2025 :

Tabel 2.16 Layanan angkutan menunjang Obyek Wisata Unggulan

NO	LINTASAN	JARAK (KM)
1	Terminal Duingingi - Botubarani - Pantai Botutonuo	25
2	Terminal Duingingi - Danau Perintis	20

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Gambar 2.4 Lintasan Layanan Angkutan menunjang Obyek Wisata Unggulan



b. Pelayanan Transportasi Laut

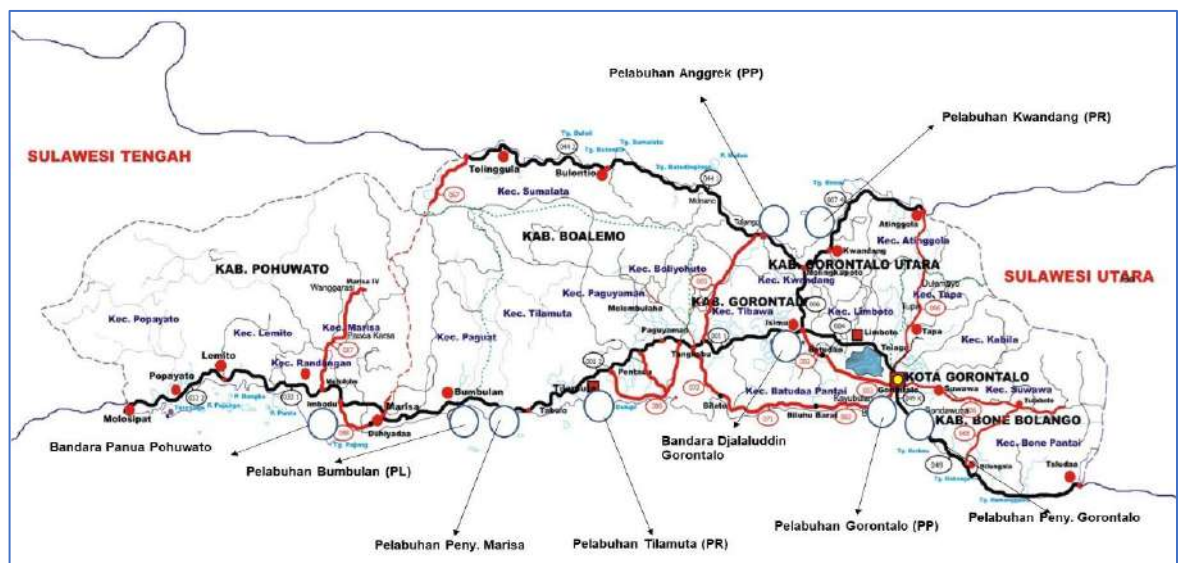
Selain Transportasi Darat untuk menunjang perekonomian Transportasi Laut dan Penyeberangan, kinerja yang telah dilakukan pada sector transportasi laut antara lain :

- Telah mengeluarkan rekomendasi teknis terkait permohonan izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sebanyak 37 perusahaan dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sebanyak 18 perusahaan.
- Melakukan Pembinaan kepada pelaku usaha jasa angkutan di perairan dimana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 37 perusahaan JPT dan 18 perusahaan PBM.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk dapat menghadirkan layanan Kapal Perintis /Tol Laut di Provinsi Gorontalo untuk melayani penumpang, barang, peti kemas maupun ternak serta penambahan frekuensi layanan untuk kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa.
- Melakukan evaluasi dan monitoring aktivitas di pelabuhan laut dan penyeberangan.

Provinsi Gorontalo memiliki 5 (lima) pelabuhan laut yang terletak di pesisir Utara dan Selatan. Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 tahun 2002 tentang Tata letak Pelabuhan Nasional, maka terdapat 3 (tiga) pelabuhan nasional yakni Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang, 1 (satu) pelabuhan regional yakni Pelabuhan Tilamuta dan 1 (satu) pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan Bumbulan.

Di pesisir utara terdapat Pelabuhan Anggrek yang dikhususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, untuk Pelabuhan Kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-toli Sulawesi Tengah, Tarakan. Sedangkan di pesisir selatan terdapat Pelabuhan Gorontalo sebagai pengumpul, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Bumbulan dimana ke 3 (tiga) pelabuhan tersebut bertugas sebagai pelabuhan pengumpan di kawasan Teluk Tomini. Lokasi masing-masing pelabuhan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5 Lokasi Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo



Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Operasional kantor pelabuhan-pelabuhan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dijalankan oleh Kepala Kantor Pelabuhan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, Kakanpel tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Demikian halnya dalam pengajuan/penambahan anggaran ke Kementerian Perhubungan RI melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Aktivitas yang ada di masing-masing Pelabuhan terdiri dari layanan angkutan reguler dan perintis seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Rute/Lintasan Kapal Laut dan Kapal Penyeberangan di Prov Gorontalo

Pelayanan Kapal di Pelabuhan Singgah			
No	Pelabuhan Singgah	Nama Kapal / Pelabuhan Pangkal	Rute / Lintasan
1	Pelabuhan Gorontalo	KM. TILONGKABILA / Pangkalan Bitung	Bitung - Gorontalo - Luwuk - Kendari - Raha - Bau-bau - Makassar - Labuanbajo - Bima - Lembar - Benoa (PP)
		KM. Sabuk Nusantara 59 / Pangkalan Pagimana	Pagimana - Gorontalo - Pasokan - Wakai - Ampana - Una una - Parigi - Una una - Ampana - Wakai - Pasokan - Gorontalo - Pagimana - Gorontalo - Banggai - Bobong - Banggai - Gorontalo - Pagimana (PP)
		KM. Sabuk Nusantara 102 / Pangkalan Poso	Poso - Ampana - Wakai - Malenge - Popolii - Pasokan - Gorontalo - Bitung (PP)
		KM. Sabuk Nusantara 78 / Pangkalan Kendari	Kendari - Molawe - Bungku - Bobong - Tikong - Luwuk - Ampanan - Gorontalo
		KM. Sabuk Nusantara 38 / Pangkalan Poso	Poso - Mentangisi - Wakai - Malenge - Popolii - Pasokan - Gorontalo - Bitung (PP)
		KM. Sabuk Nusantara 50 / Pangkalan Kolonedale	Kolonedale - Bungku - Menui - Kendari - Menui - Bungku - Kolonedale - Baturube - Banggai - Gorontalo - Banggai - Baturube - Kolonedale
		KM. Okayama	Ampana - Lebiti - Pasokan - Gorontalo - Pasokan - Polipolii - Malenge - Wakai - Una una - Parigi
		KM. Banda Naira	Parigi - Una-una - Wakai - Malenge - Gorontalo - Unauna - Parigi - Unauna - Bumbulan - Malenge - Mautong - Wakai - Tinombo - Unauna - Ampana - Wakai - Malenge - Unauna - Parigi
2	Pelabuhan Kwandang	KM. Sabuk Nusantara 116 / Pangkalan Tarakan	Tarakan - Toli-toli - Leok - Paleleh - Kwandang (PP)

Pelayanan Kapal di Pelabuhan Pangkal			
No	Pelabuhan Pangkal	Nama Kapal	Rute/Lintasan
1	Pelabuhan Gorontalo	KM. Daraki Nusa (Perintis)	Gorontalo - Bunta - Bualemo (Sulteng) - Bobong (P.Taliabo) - Boalemo (Sulteng) - Bunta - Gorontalo
		KM. Sabuk Nusantara 76 (Perintis)	Gorontalo - Luwuk - Mansaleang - Tikong - Ternate - Tikong - Mansaleang - Luwuk - Gorontalo
		KM. Sabuk Nusantara 83 (Perintis)	Gorontalo - Banggai - Samuya - Falabisahaya - Dofa - Sanana - Namlea - Ambon - Namlea - Sanan - Dofa - Falabisahaya - Samuya - Banggai - Gorontalo
2	Pelabuhan Tilamuta	KM. Sabuk Nusantara 113 (Perintis)	Tilamuta - Bualemo (Sulteng) - Banggai - Raha - Makassar - Raha - Banggai - Bualemo (Sulteng) - Bumbulan - Tilamuta
3	Pelabuhan Kwandang	KM. Sabuk Nusantara 97 (Perintis)	Kwandang - Paleleh - Leok - Toli-toli - Tarakan - Nunukan - Pulau Sebatik - Tarakan - Toli-toli - Leok - Paleleh - Kwandang
4	Pelabuhan Peny. Gorontalo	KMP. Monit	Gorontalo - Pagimana
		KMP. Tuna Tomini (Perintis)	Gorontalo - Wakai - Ampana
5	Pelabuhan Peny. Marisa	KMP. Cengkih Apo (Perintis)	Marisa - Dolong - Pasokan - Ampana

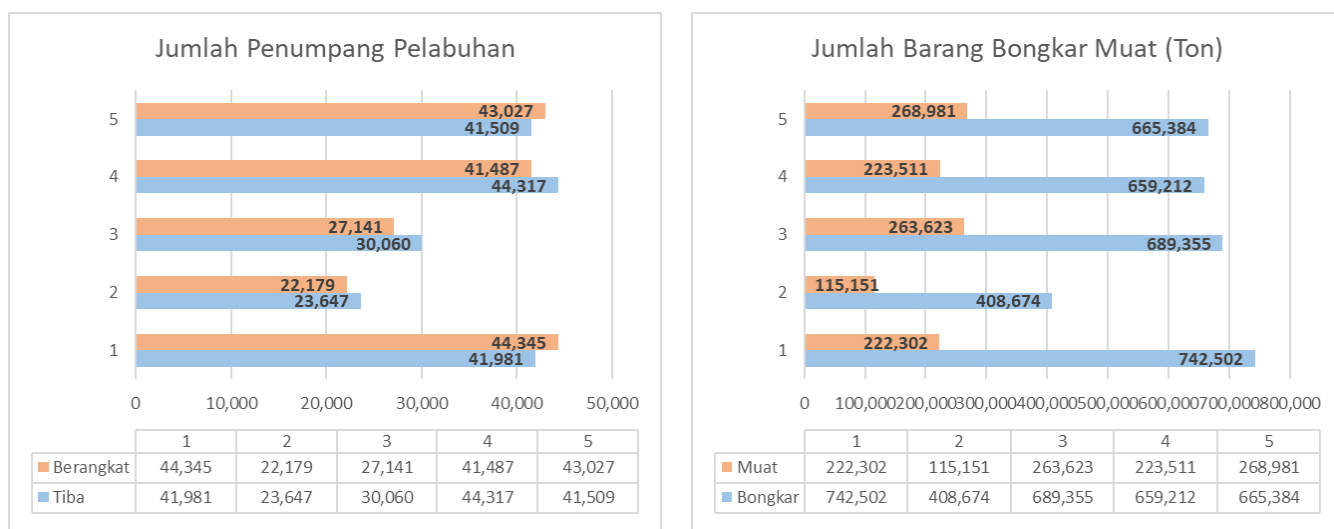
Sumber Data : Laporan UPT Pelabuhan Gorontalo, Kwandang, Tilamuta dan Balai Transportasi Darat Prov. Gorontalo

Adapun produktivitas di seluruh Pelabuhan Laut Gorontalo dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut :

Tabel 2.18. Produktifitas Pelabuhan Gorontalo 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Barang (Ton)						Hewan		
		Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Export	Imort	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	41,981	44,345	86,326	742,502	222,302	964,804	0	0	0	0	0	0
2	2021	23,647	22,179	45,826	408,674	115,151	523,826	0	0	0	0	0	0
3	2022	30,060	27,141	57,201	689,355	263,623	952,978	0	0	0	0	0	0
4	2023	44,317	41,487	85,804	659,212	223,511	882,723	0	0	0	0	0	0
5	2024	41,509	43,027	84,536	665,384	268,981	934,365	0	0	0	0	0	0
Total		181,514	178,179	359,693	3,165,127	1,093,568	4,258,696	0	0	0	0	0	0

Grafik 2.5 Grafik Produktivitas Pelabuhan Gorontalo 5 tahun terakhir

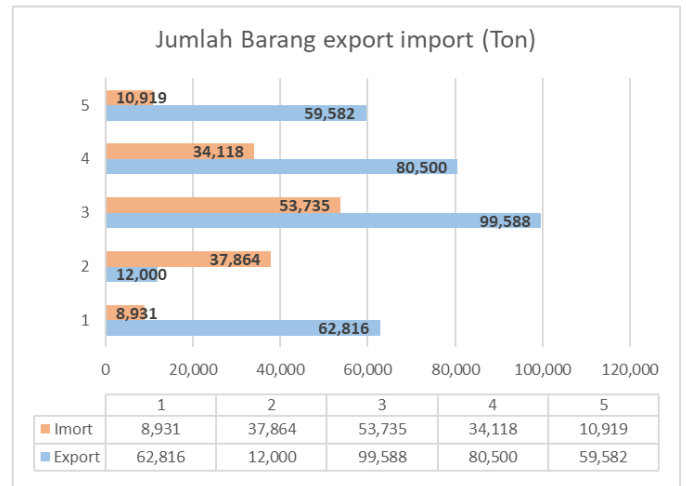
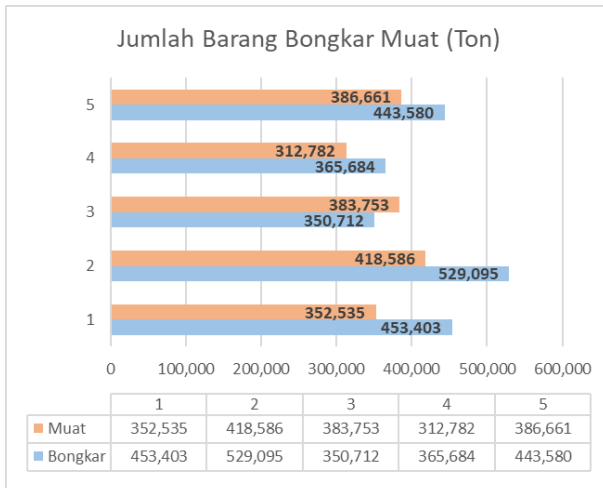


Dari Tabel dan Grafik di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penumpang dan barang yang tiba dan berangkat maupun bongkar dan muat mengalami capaian peningkatan yang baik ditahun 2024, walaupun terjadi peningkatan yang fluktuatif namun capaian ini sudah baik sehingga diharapkan terjadi peningkatan di tahun berikutnya untuk peningkatan ekonomi.

Tabel 2.19. Produktifitas Pelabuhan Angrek 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Barang (Ton)						Hewan		
		Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Export	Imort	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	0	0	0	453,403	352,535	805,938	62,816	8,931	71,747	0	0	0
2	2021	0	0	0	529,095	418,586	947,681	12,000	37,864	49,864	0	0	0
3	2022	0	0	0	350,712	383,753	734,465	99,588	53,735	153,323	0	0	0
4	2023	0	0	0	365,684	312,782	678,466	80,500	34,118	114,618	0	0	0
5	2024	0	0	0	443,580	386,661	830,240	59,582	10,919	70,501	0	0	0
Total		0	0	0	2,142,473	1,854,317	3,996,790	314,486	145,568	460,054	0	0	0

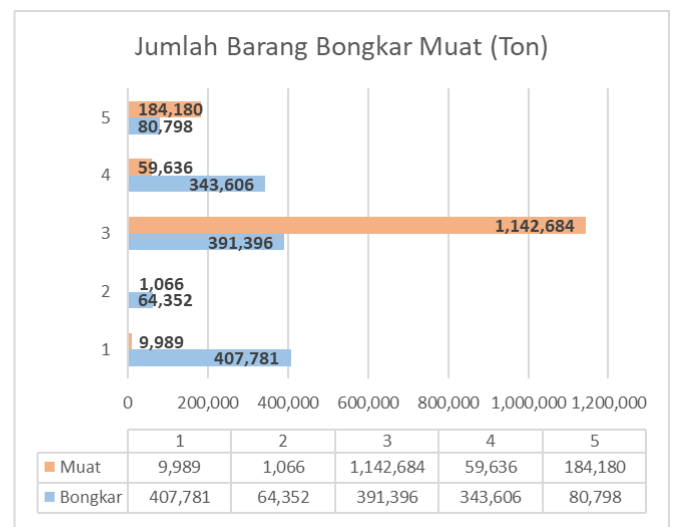
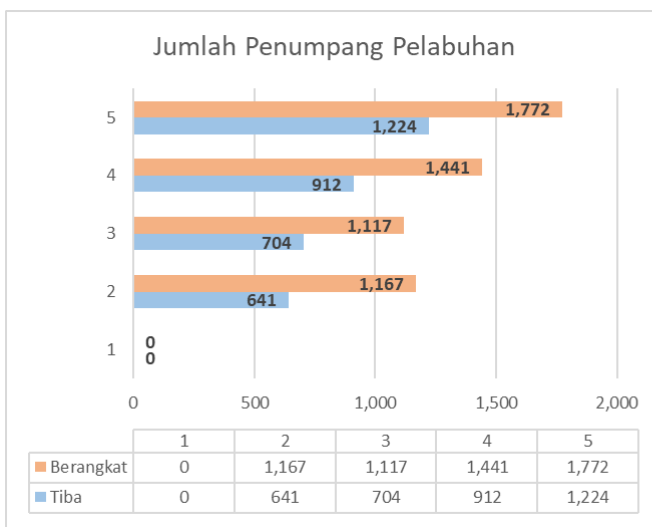
Grafik 2.6 Grafik Produktivitas Pelabuhan Anggrek 5 tahun terakhir



Tabel 2.20 Produktifitas Pelabuhan Kwandang 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Barang (Ton)						Hewan		
		Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Export	Import	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	0	0	0	407,781	9,989	417,770	0	0	0	0	0	0
2	2021	641	1,167	1,808	64,352	1,066	65,418	0	0	0	0	0	0
3	2022	704	1,117	1,821	391,396	1,142,684	1,534,080	0	0	0	0	0	0
4	2023	912	1,441	2,353	343,606	59,636	403,242	0	0	0	0	0	0
5	2024	1,224	1,772	2,996	80,798	184,180	264,978	0	0	0	0	0	0
Total		3,481	5,497	8,978	1,287,933	1,397,555	2,685,488	0	0	0	0	0	0

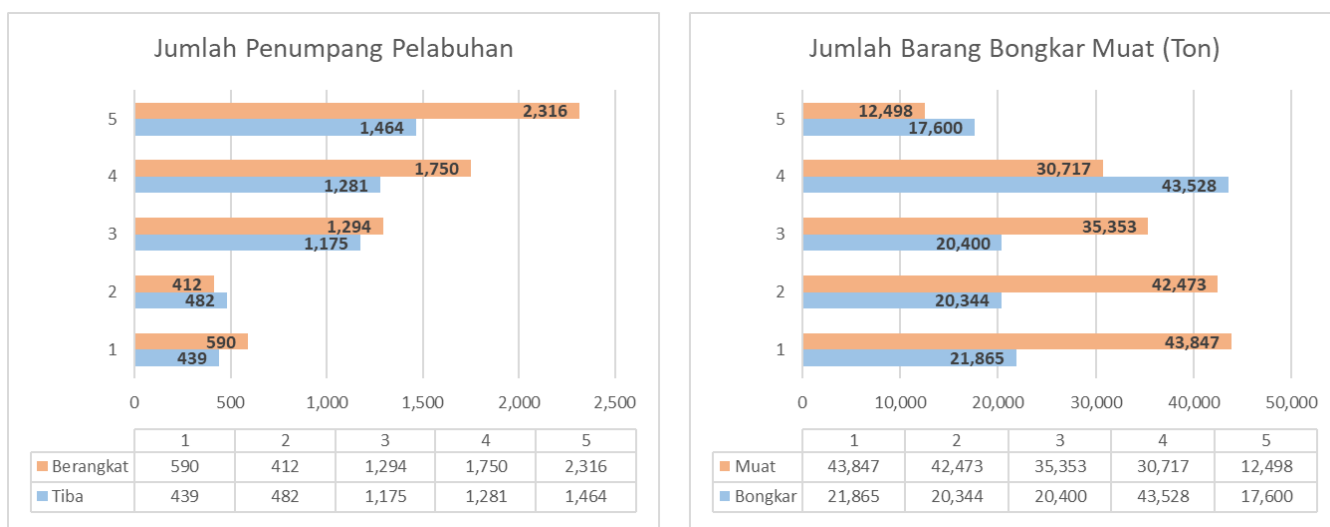
Grafik 2.7 Grafik Produktivitas Pelabuhan Kwandang 5 tahun terakhir



Tabel 2.21 Produktifitas Pelabuhan Tilamuta 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Barang (Ton)						Hewan		
		Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Export	Imort	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	439	590	1,029	21,865	43,847	65,712	0	0	0	0	0	0
2	2021	482	412	894	20,344	42,473	62,817	0	0	0	0	0	0
3	2022	1,175	1,294	2,469	20,400	35,353	55,753	0	0	0	0	0	0
4	2023	1,281	1,750	3,031	43,528	30,717	74,245	0	0	0	0	0	0
5	2024	1,464	2,316	3,780	17,600	12,498	30,098	0	0	0	0	0	0
Total		4,841	6,362	11,203	123,737	164,888	288,625	0	0	0	0	0	0

Grafik 2.8 Grafik Produktivitas Pelabuhan Tilamuta 5 tahun terakhir

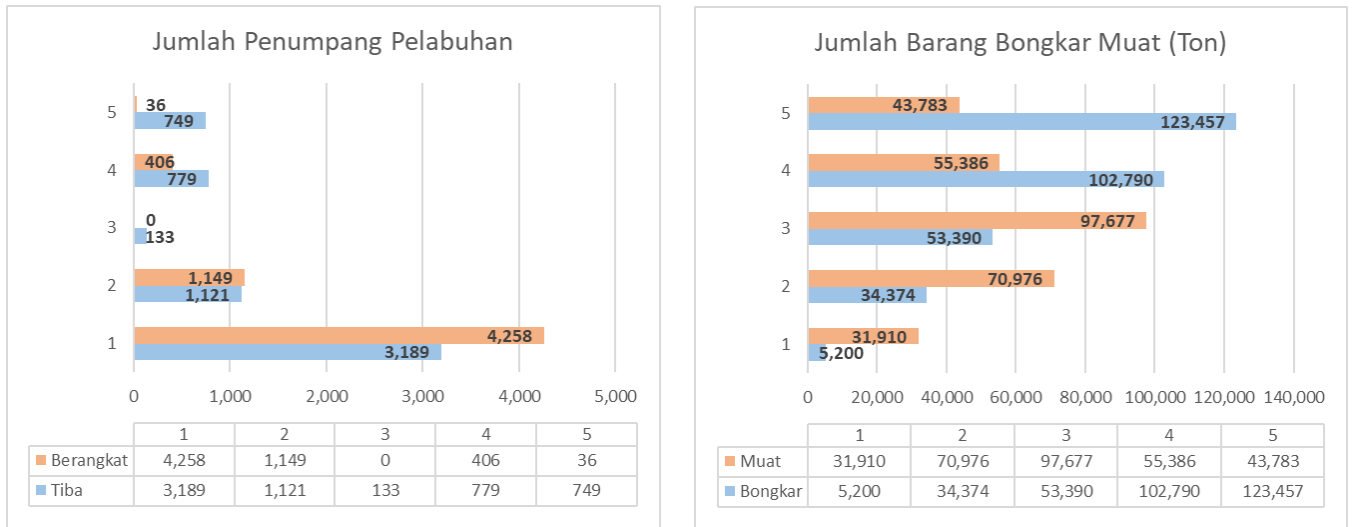


Tabel 2.22 Produktifitas Pelabuhan Bumbulan 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Barang (Ton)						Hewan		
		Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Export	Imort	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	3,189	4,258	7,447	5,200	31,910	37,110	0	0	0	0	0	0
2	2021	1,121	1,149	2,270	34,374	70,976	105,350	0	0	0	0	0	0
3	2022	133	0	133	53,390	97,677	151,067	0	0	0	0	0	0
4	2023	779	406	1,185	102,790	55,386	158,176	0	0	0	0	0	0
5	2024	749	36	785	123,457	43,783	167,240	0	0	0	0	0	0
Total		5,971	5,849	11,820	319,211	299,732	618,943	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Laporan dari UPT Pelabuhan Gorontalo, Anggrek, Kwandang, Tilamuta dan Bumbulan

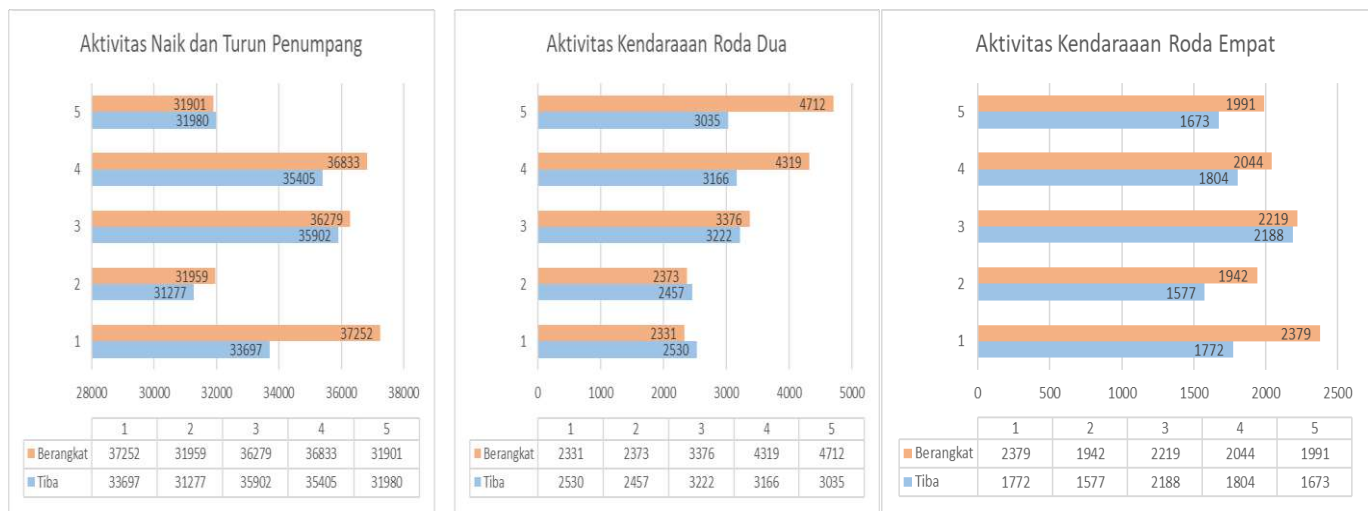
Grafik 2.9 Grafik Produktivitas Pelabuhan Bumbulan 5 tahun terakhir



Tabel 2.23 Produktifitas Pelabuhan Penyeberangan 5 Tahun Terakhir

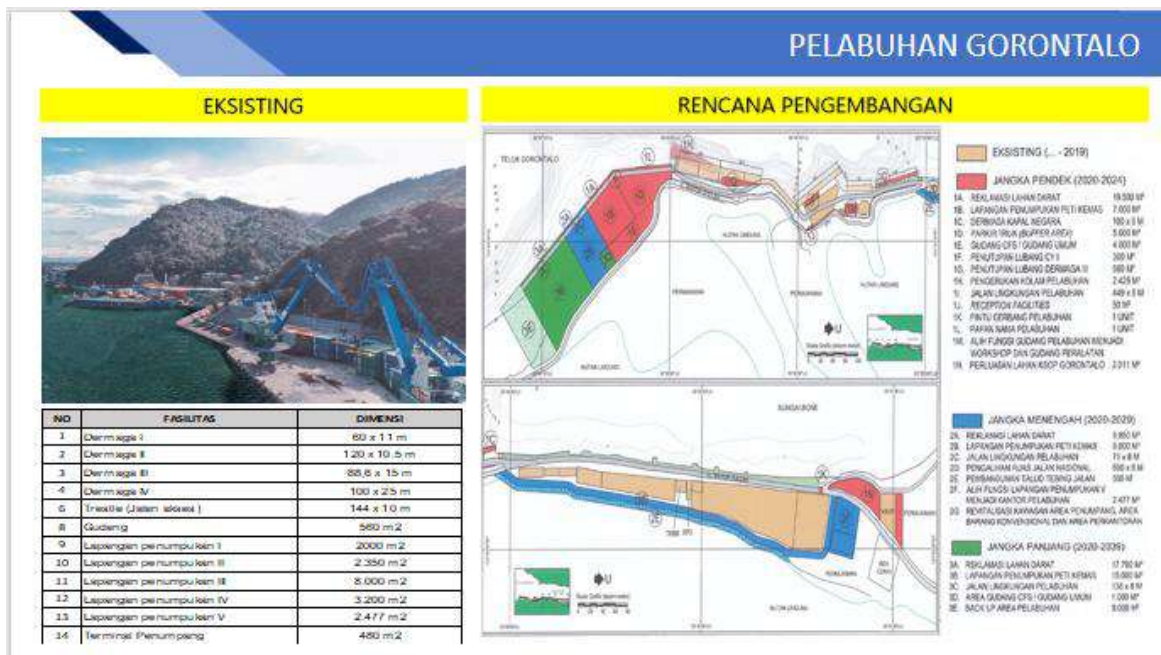
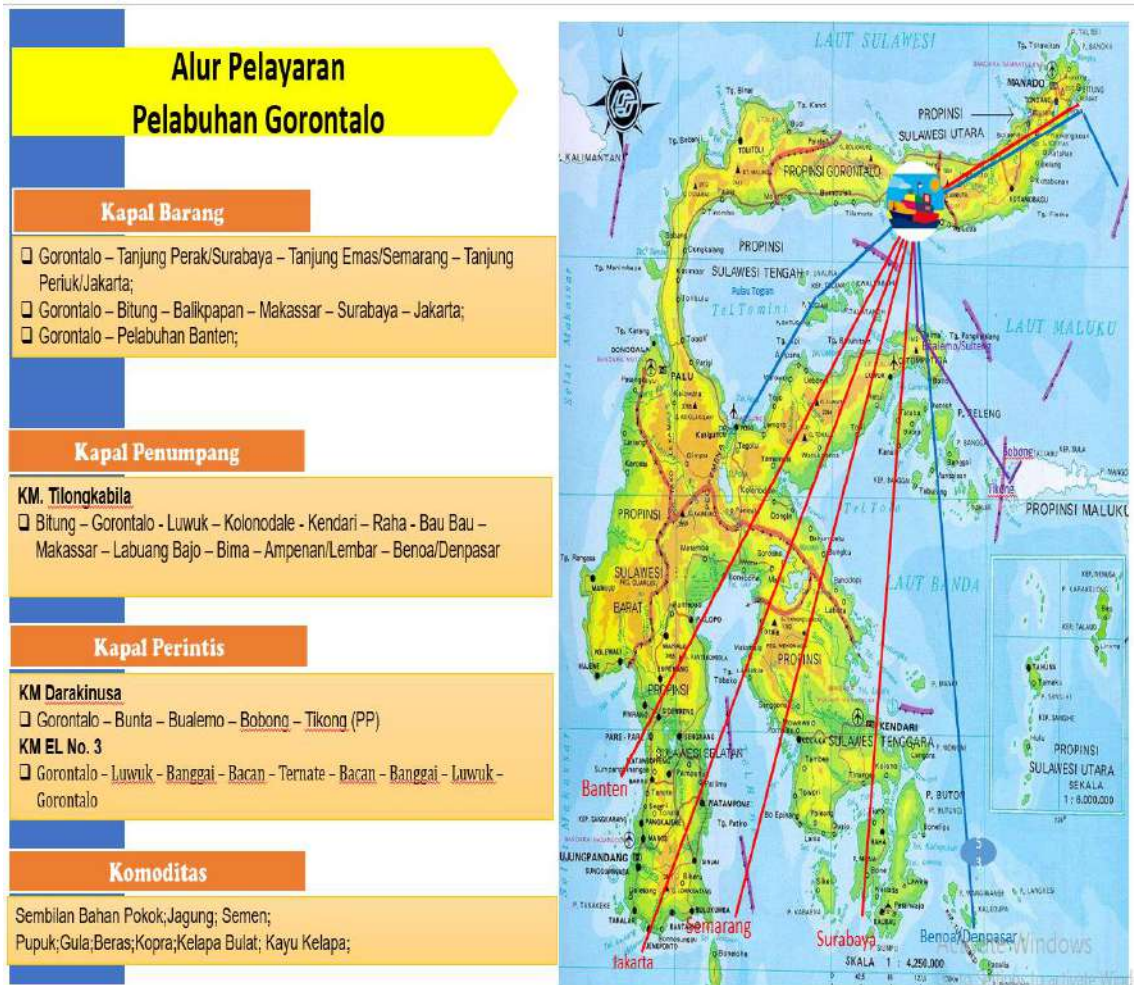
No	Tahun	Jumlah Penumpang			Kendaraan					
		Tiba	Berangkat	Total	Roda Dua			Roda Empat		
					Tiba	Berangkat	Total	Tiba	Berangkat	Total
3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10		
1	2020	33697	37252	70949	2530	2331	4861	1772	2379	4151
2	2021	31277	31959	63236	2457	2373	4830	1577	1942	3519
3	2022	35902	36279	72181	3222	3376	6598	2188	2219	4407
4	2023	35405	36833	72238	3166	4319	7485	1804	2044	3848
5	2024	31980	31901	63881	3035	4712	7747	1673	1991	3664
Total		168261	174224	342485	14410	17111	31521	9014	10575	19589

Grafik 2.10 Grafik Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan 5 tahun terakhir



Sumber Data : Laporan Pelabuhan Penyeberangan

Gambar 2.6 Alur Pelayaran, Kondisi Eksisting dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Gorontalo

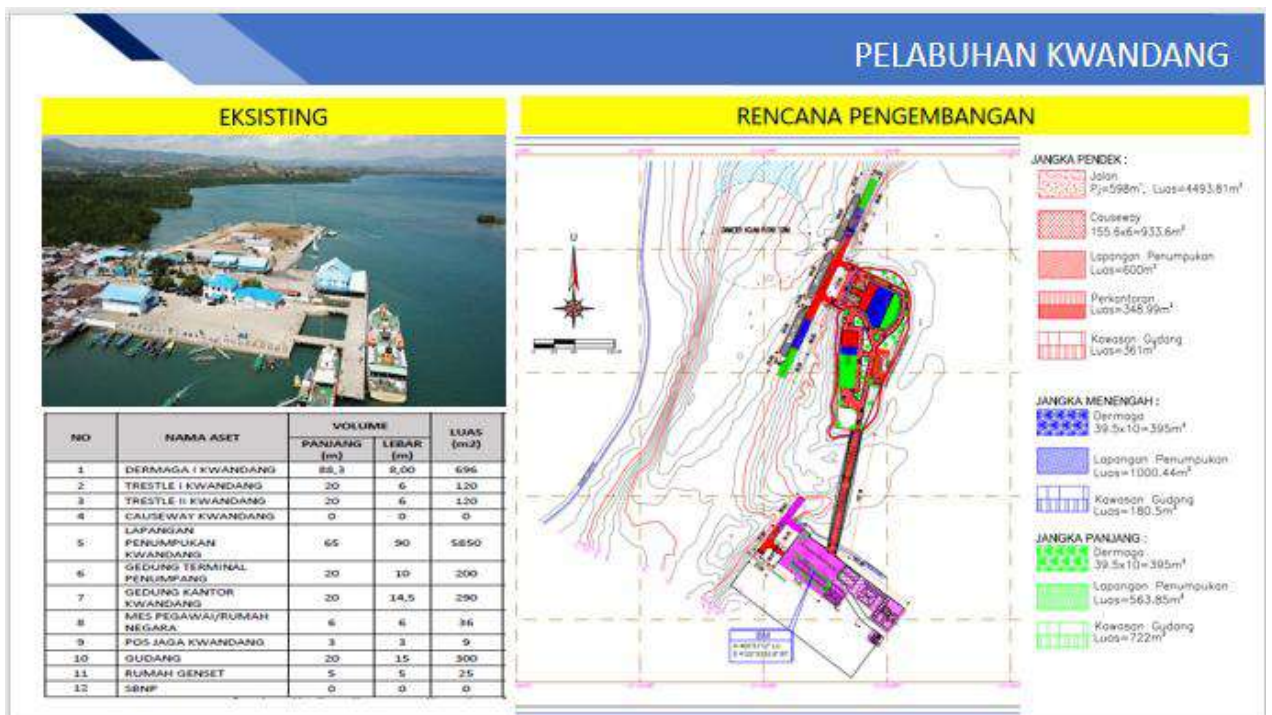


Gambar 2.7 : Alur Pelayaran, Kondisi eksisting dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Anggrek



Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo

Gambar 2.8 : Alur Pelayaran, Kondisi eksisting dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Tilamuta



Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo



c. Pelayanan Transportasi Udara

Untuk sektor transportasi udara, sampai kinerja pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Mendorong pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo menjadi Bandara Embarkasi Haji Penuh yang telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama.
2. Operasional Bandar Udara Pohuwato sebagai salah satu bandara yang telah operasional pada tahun 2024 dengan dilakukan pengesermsian oleh Bpk Presiden Jokowi tanggal 22 April 2024, tahun ini Bandara Panua Pohuwato telah melayani penerbangan perintis dengan rute Gorontalo – Bolmong – Manado – Siau – Miangas – Melonguane – Miangas – Naha - Siau – Manado, Manado – Bolmong – Gorontalo; Gorontalo – Buol - Buol – Gorontalo; Gorontalo - Pohuwato – Palu - Palu – Pohuwato – Gorontalo – Bolmong – Manado
3. Melakukan evaluasi dan monitoring aktivitas bandar udara Djalaludin dan Bandara Panua Pohuwato.



1) Bandara Djalaluddin Gorontalo

Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo merupakan bandar udara yang ada di Provinsi Gorontalo dimana beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan infrastruktur yang cukup signifikan. Adapun fasilitas yang ada di bandar udara saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Status Bandara Nasional Kelas I
- b) Kapasitas Landasan Boeing 737-500, Boeing 737-800NG, Boeing 737 900ER, Airbus A320, Bombardier CRJ-1000
- c) Runway Strip uk. 2.680 m x 150 m
- d) Konstruksi Asphalt Concrete dengan kekuatan PCN 52 F/C/Y/T
- e) Taxiway Apron Lama 2 bh uk. 230 M x 80 M
- f) Taxiway Apron Baru uk. 290 M x 130 M
- g) Apron Lama uk. 231,5 m x 80 m, kapasitas maksimum parkir pesawat ± 3 bh pesawat
- h) Apron Baru uk. 130 m x 290 m, kapasitas maksimum parkir pesawat ± 6 bh pesawat
- i) Terminal Penumpang 11.059 m², kapasitas maksimum penumpang ± 2000 orang

Kedepannya Bandara Djalaluddin Gorontalo di fokuskan menjadi Bandara Internasional Regional / Haji.

Adapun rute lintasan dan maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Djalaludin adalah sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2.23 Rute dan Maskapai yang beroperasi di Bandara Djalaluddin Gorontalo

No	Maskapai	A/C Type	Flight No	Route	ETA (WITA)	ETD (WITA)	Schedule
1	Garuda	B 737 800	GA642/643	GTO - UPG	13.55	14.20	Kamis
2	Garuda	B 737 800	GA644/645	GTO - CGK	09.10	10.20	Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu
3	Lion Air	B 737 900	JT 792/891	GTO - UPG	09.40	14.30	Senin s.d Minggu (Dialy)
4	Lion Air	B 737 900	JT 892/793	GTO - UPG	13.40	14.20	Senin s.d Minggu (Dialy)
5	Batik Air	B 320 200	ID 6242/6243	GTO - CGK	07.55	08.40	Senin s.d Minggu (Dialy)
6	Trigana Air	B 733	Pesawat Cargo	GTO - CGK	-	-	4 Kali Seminggu
7	Tri-M.G Airline	B 737 - 300 F	Pesawat Cargo	GTO - CGK	-	-	4 Kali Seminggu
8	Rimbun Air	-	Pesawat Cargo	GTO - CGK	-	-	4 Kali Seminggu
9	SAM Air	C 208 B Grand Caravan	Pesawat Perintis	GTO - Pohuwato - Palu	-	-	1 Kali Seminggu
10	SAM Air	C 208 B Grand Caravan	Pesawat Perintis	GTO - Buol	-	-	1 Kali Seminggu
11	SAM Air	C 208 B Grand Caravan	Pesawat Perintis	GTO - Bolmong - Manado	-	-	1 Kali Seminggu

Sumber Data : Laporan Bandara Djalaluddin Gorontalo



Secara administrasi bandara ini merupakan salah satu UPT Kementerian Perhubungan dan dalam menjalankan tugasnya Kepala Bandara bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan disamping juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berikut aktivitas di bandara Djalaluddin Gorontalo dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.24 Produktifitas Bandar Udara Djalaluddin 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penumpang			Pesawat			Bagasi (Kg)			Cargo (Kg)		
		Tiba	Berangkat	Total	Tiba	Berangkat	Total	Bongkar	Muat	Total	Bongkar	Muat	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13
1	2020	110,407	116,582	226,989	1,937	1,937	3,874	732,984	544,516	1,277,500	2,276,121	489,463	2,765,584
2	2021	100,633	97,682	198,315	1,493	1,493	2,986	833,609	661,571	1,495,180	3,951,218	421,797	4,373,015
3	2022	148,418	149,755	298,173	1,649	1,650	3,299	1,569,873	1,293,323	2,863,196	4,363,323	370,307	4,733,630
4	2023	168,998	172,400	341,398	1,589	1,588	3,177	1,849,814	1,429,155	3,278,969	3,360,945	574,869	3,935,814
5	2024	153,993	131,401	285,394	1,147	1,147	2,294	1,594,174	1,409,797	3,003,971	3,120,536	839,162	3,959,698
Total		682,449	667,820	1,350,269	7,815	7,815	15,630	6,580,454	5,338,362	11,918,816	17,072,143	2,695,598	19,767,741

Grafik 2.11 Grafik Produktivitas Bandar Udara Djalaluddin 5 Tahun Terakhir



Sumber Data : Laporan Bandara Djalaluddin Gorontalo

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pergerakan penumpang di Bandara Djalaluddin mengalami fluktuatif dimana tahun 2024 terjadi penurunan penumpang dari tahun 2023, sedangkan untuk pergerakan barang dan cargo mengalami pergerakan yang stabil

2) Bandara Panua Puhwato

Bandara Panua Puhwato adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kabupaten Puhwato, Gorontalo, Indonesia. Bandar Udara ini terletak sekitar 31 km di sebelah barat dari pusat kota Marisa ibukota dari Kabupaten Puhwato.

Bandar Udara Panua mulai dibangun sejak tahun 2015 dengan anggaran sebesar kurang lebih 497 miliar, Bandara ini diselesaikan pada

Tabel 2.25 Crosscutting Dinas Perhubungan dengan OPD Provinsi

No.	OPD PROVINSI GORONTALO	CROSS CUTTING
1	Dinas Dikbudpora (SMA/SMK)	Tersedianya Bus Gratis NKRI untuk Siswa
2	Dinas Pariwisata	Tersedianya layanan angkutan penunjang obyek wisata
3	Dinas Kesehatan	Tersedianya penunjang fasilitas kesehatan
4	Dinas Pertanian	Penyediaan Bahan komoditi yang akan di distribusi ke daerah terpencil maupun sebaliknya
5	Dinas Pangan	Penyediaan Bahan komoditi yang akan di distribusi ke daerah terpencil maupun sebaliknya
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	Penyediaan Bahan komoditi yang akan di distribusi ke daerah terpencil maupun sebaliknya
7	Dinas Kumperindag	Penyediaan produk UMKM yang akan disalurkan
8	Dinas PUPR	Koordinasi terhadap pembangunan fisik prasarana transportasi seperti jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan lainnya
9	Dinas Sosial	Dukungan layanan sosial dalam mendukung sektor perhubungan
10	Satpol PP	Dukungan terhadap penertiban pelanggaran lalu lintas
11	Inspektorat	Penyusun dan pengawas urusan pemerintahan bidang perhubungan
12	Bappeda	Dukungan perencanaan
13	Badan Keuangan Daerah	Dukungan penganggaran
14	BPBD	Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana serta koordinasi kedaruratan dan logistik bila terjadi bencana
15	Biro Pembangunan dan Ekonomi	Dukungan percepatan realisasi anggaran
16	Biro Pengadaan	Dukungan untuk proses pengadaan (lelang, e catalog, pengadaan langsung)
17	Biro Pemkesra	Koordinasi perbantuan beasiswa bagi kesejahteraan calon pegawai Perhubungan Provinsi Gorontalo
18	Biro Hukum	Evaluasi dan koordinasi perumusan kebijakan pada telaah hukum, penyusunan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan, serta bantuan hukum di bidang Perhubungan

Tabel 2.26 Crosscutting Dinas Perhubungan dengan Dishub Kab Kota dan Instansi Vertikal

No.	INSTANSI	CROSS CUTTING
1	Ditlantas Polda Gorontalo	Dukungan terhadap penegakan hukum di bidang lalu lintas.
2	Dishub Kab./Kota	Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas angkutan darat.
3	UPT Lingkungan Perhubungan	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana transportasi seperti Bandara Djalaluddin Gorontalo, BPTD Wilayah XXI Gorontalo, KSOP Gorontalo, KSOP Anggrek, UPP Kwandang, UPP Tilamuta, PT. Damri Cab. Gorontalo, dan PT. Pelindo Gorontalo.
4	Balai Jalan Prov. Gorontalo	Dukungan dalam perencanaan, pengadaan, dan pengendalian mutu bahan & peralatan jalan serta jembatan.
5	Balai Sungai Prov. Gorontalo	Tersedianya pengelolaan Drainase, sistem Hidrologi, dan sumber daya air pada wilayah sungai.
6	BPKH	Tersedianya data dan informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan.

Tabel 2.27 Crosscutting Dinas Perhubungan dengan Perguruan Tinggi, Jasa Raharja dan Swasta

No.	STAKEHOLDER	CROSS CUTTING
1	Perguruan Tinggi	Pada Mahasiswa Pengguna transportasi umum (Bus)
2	PT. Jasa Raharja Gorontalo	Tersedianya data kecelakaan lalulintas serta asuransi sosial milik negara terhadap penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.
3	Organda	Organisasi mitra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang membangkitkan dan memulihkan industri angkutan jalan
4	ALFI/ILFA	Koordinasi terhadap jasa pengurusan transportasi dan logistik, termasuk kepabeanan.
5	Pengusaha Transportasi	Dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan transportasi berupa penyediaan transportasi bagi masyarakat

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

1. Kerjasama Daerah yang terkait dengan Bidang Perhubungan

Beberapa Kerjasama telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yaitu :

a) Perjanjian Kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2023.

Dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Fasilitas konektivitas Pelabuhan laut di Provinsi Gorontalo dengan Pelabuhan laut di Provinsi Jawa Timur untuk Angkutan antar pulau.
- Pengembangan sistem penyelenggaraan angkutan umum perkotaan/aglomerasi dan sistem penyelenggaraan terminal tipe B
- Digitalisasi layanan publik bidang perhubungan
- Pertukaran data dan informasi hasil studi di bidang Perhubungan
- Fasilitasi dan Koordinasi terkait dengan optimalisasi layanan perhubungan udara
- Pengembangan SDM dalam pengelolaan *Area Traffic Control System (ATCS)*, pengelolaan angkutan umum perkotaan/aglomerasi, pengelolaan terminal tipe B, kepelabuhanan dan kebandarudaraan. *(terlampir surat perjanjian Kerjasama)*



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR : 120.23/383 /PKS/011.3/2022

NOMOR : 001/DISHUB/1195/XII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14- 12 - 2022)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. NYONO : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, Jalan Ahmad Yani 268 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/548/204/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pengangkatan dalam jabatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. MUHAMMAD JAMAL : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Thayeb Moh.Gobel Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.2/BKPPD/SK/03/XII/ 1451/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PROVINSI GORONTALO		PROVINSI JAWA TIMUR	
DISHUB	BIRO PEM. OTDAKER	DISHUB	BIRO PEM. OTDA

- b) Perjanjian Kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat Nomor : HK.201/6/22/PTDI-STTD-2024 dan Nomor : 280/PEMKESRA/KB/V/2024.

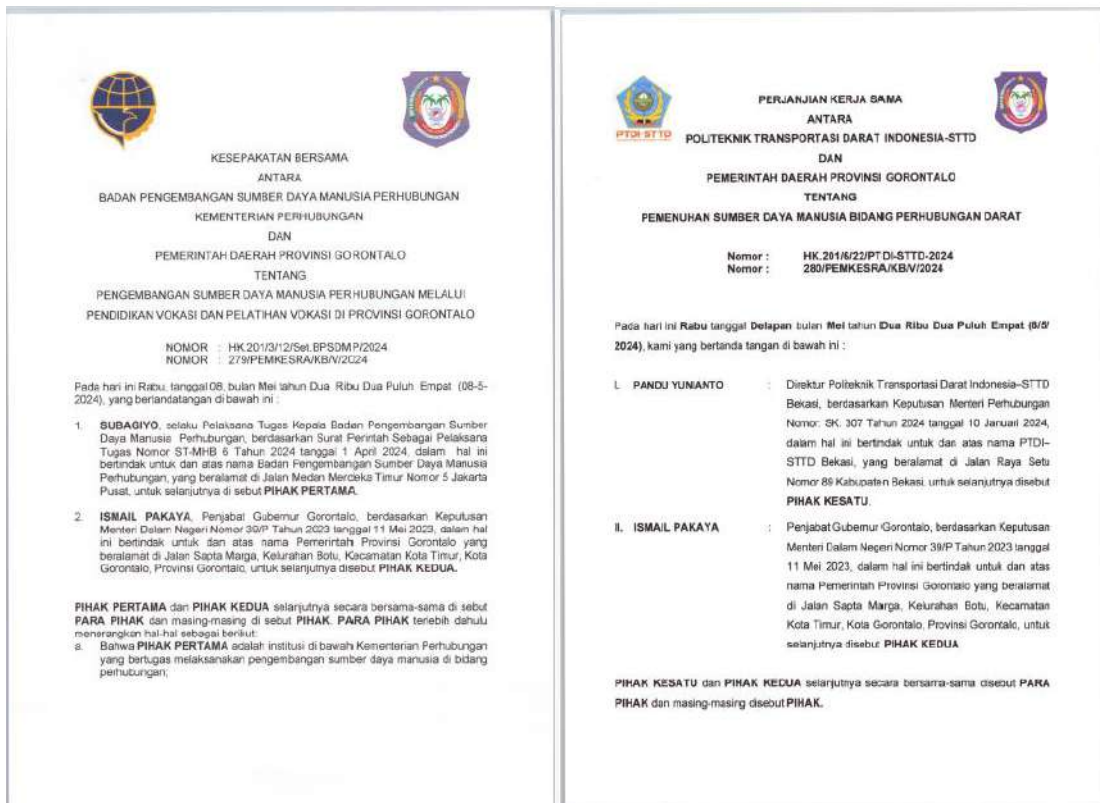
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- Penetapan usulan kebutuhan SDM bidang Perhubungan Darat.
- Sosialisasi program, penerimaan dan seleksi SDM bidang Perhubungan Darat.
- Penyelenggaraan Pendidikan tinggi SDM bidang Perhubungan Darat.
- Pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SDM Bidang Perhubungan Darat.
- Pemberdayaan SDM Bidang Perhubungan Darat.

c) Kesepakatan bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengembangan Sumber Daya manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Gorontalo Nomor : HK.201/3/12/Set.BPSDMP/2024 dan Nomor : 279/PEMKESRA/KB/V/2024.

Maksud dan Tujuan Kesepakatan ini meliputi :

- Meningkatkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Provinsi Gorontalo.
- Menjalin Kemitraan strategis dalam pelaksanaan Pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses Pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi Masyarakat Provinsi Gorontalo.



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis OPD

A. Permasalahan Strategis OPD

Jika melihat potret ke belakang selama 5 (lima) tahun terakhir perjalanan Provinsi Gorontalo disana ada beberapa keberhasilan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa disana juga terdapat beberapa permasalahan, tantangan dan peluang khususnya dibidang Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Baru terdapat 1 (satu) Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto pada tanggal 15 Agustus 2022 dimana sedangkan sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga amanah UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelolaan terminal tipe B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan merupakan kegiatan strategis tahun 2025.
2. Banyak pengusaha angkutan (orang dan barang) yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan sesuai ketentuan sehingga perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Perlu peningkatan digitalisasi layanan perizinan dan pengawasan angkutan umum.
4. Terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan yang belum terlayani oleh angkutan umum reguler dan masih kurangnya

angkutan massal di perkotaan sehingga memerlukan adanya layanan angkutan yang lebih memadai.

5. Masih banyak sekolah (khususnya SMU/SMK) yang belum terlayani oleh angkutan sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah.
6. Minimnya sarana penunjang pelaksanaan pengawasan angkutan di jalan.
7. Banyaknya pusat perdagangan yang belum menerapkan Andalalin dan dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan.
8. Kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Gorontalo akibat banyaknya parkir liar.
9. Masih belum terturnya operasional mobil container yang melewati jalan didalam Kota Gorontalo
10. Belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal.
11. Memudarnya marka di beberapa ruas jalan Provinsi dan persimpangan traffic light yang berpengaruh menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
12. Perlu adanya study lanjutan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara menyeluruh untuk jalan Provinsi.
13. Belum optimalnya wadah forum LLAJ di Provinsi Gorontalo.
14. Penguatan Dukungan fasilitas keselamatan LLAJ untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.
15. Masih kurangnya koordinasi dalam mendorong peningkatan infrastruktur Bandara dan Pelabuhan di Provinsi Gorontalo.
16. Terdapat beberapa badan usaha di Pelabuhan yang beraktifitas di Pelabuhan JPT, PBM, Depo peti kemas yang belum memiliki izin.
17. Dikawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi) Embarkasi Haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang berpusat di Makassar Sulawesi Selatan
18. Kantor Dinas Perhubungan yang saat ini masih 1 (satu) Gedung dengan Dinas Kominfo dan Statistik sehingga mempengaruhi aktivitas pelayanan public

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo akan di jelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28. Tabel Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
BIDANG ANGKUTAN JALAN						
Terdapatnya daerah sentra produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang belum bisa memasarkan hasil pertaniannya karena keterbatasan sarana transportasi	layanan angkutan perintis yang belum seluruhnya terlayani	pencemaran lingkungan melalui Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan gas buang emisi diseluruh dunia memacu peningkatan gas rumah kaca	Peningkatan gas buang emisi diseluruh wilayah indonesia memacu peningkatan gas rumah kaca	Armada angkutan yang beroperasi agar dilakukan peremajaan untuk meminimalisir efek gas rumah kaca	terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra - sentra produksi dan objek wisata unggulan yang belum terlayani oleh angkutan umum
Terdapatnya SMU/SMK yang merupakan kewenangan Provinsi yang masih minim layanan transportasi termasuk obyek wisata unggulan dan layanan angkutan aglomerasi perkotaan	layanan angkutan sekolah, layanan menunjang obyek wisata unggulan dan layanan angkutan aglomerasi perkotaan yang masih minim	pencemaran lingkungan melalui Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan gas buang emisi diseluruh dunia memacu peningkatan gas rumah kaca	Peningkatan gas buang emisi diseluruh wilayah indonesia memacu peningkatan gas rumah kaca	Armada angkutan yang beroperasi agar dilakukan peremajaan untuk meminimalisir efek gas rumah kaca	terdapat beberapa sekolah SMA/SMK yang tidak dilalui layanan angkutan umum, layanan angkutan menunjang obyek wisata unggulan dan layanan angkutan aglomerasi perkotaan
Penguatan Konektivitas darat dimana terdapat 6 Terminal di Kab Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun belum semua menyerahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo	Belum semua Kab Kota menyerahkan Terminal Tipe B sesuai amanat UU 23 Tahun 2014	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir menjadi penting dalam penentuan lokasi pembangunan Terminal Tipe B di Provinsi Gorontalo	belum adanya Terminal Tipe B yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dari 6 kabupaten kota hanya satu yang telah menyerahkan kewenangan terminal tipe b pada tahun 2022 yaitu kabupaten gorontalo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
BIDANG LALU LINTAS JALAN						
Terdapatnya ruas jalan di Provinsi Gorontalo yang rawan kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas	Kelancaran, ketertiban, dan keselamatan arus lalu lintas	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi daerah rawan kecelakaan lalu lintas	terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas
Terdapatnya ruas jalan di Provinsi Gorontalo yang menjadi tempat usaha dan dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan dan hambatan samping, terjadinya parkir liar	pengendalian ruas jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi daerah rawan kecelakaan lalu lintas	pada umumnya usaha - usaha yang menimbulkan bangkitan dan tarikan tidak memiliki sarana dan prasarana lalu lintas jalan (tidak adanya dokumen andalalin)
Ruas jalan Provinsi yang masih minim terdapat sarana Traffic light dan Waring light	pengendalian simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi daerah rawan kecelakaan lalu lintas	belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal
BIDANG PELAYARAN						
Bandara Djalaluddin Gorontalo yang bida dikembangkan menjadi Bandara Embarkasi Haji di Wilayah Timur Indonesia	dukungan konektivitas dan pengembangan bandara djalaluddin	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	pengembangan KEK Likupang maka mendorong bandara djalaluddin Gorontalo sebagai Bandara Alternatif dari Sam Ratulung Manado apabila terjadinya kendala cuaca di Manado di Kawasan timur Indonesia embarkasi haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang menyebabkan sebagian provinsi sudah pindah ke wilayah kawasan tengah
Terdapatnya beberapa Pelabuhan Strategis di Provinsi Gorontalo seperti Pelabuhan Kota Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta Pelabuhan Bumbulan, Pelabuhan Penyeberangan Kota Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa yang dapat meningkatkan jalur logistik pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo	dukungan konektivitas dan pengembangan pelabuhan	Pencemaran lingkungan dan isu lahan	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	peningkatan pencemaran lingkungan dan isu lahan yang terletak di daerah rawan bencana seperti tanah longsor, gempa dan banjir	pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah strategis nasional sehingga perlu peningkatan infrastruktur Pelabuhan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program sesuai dengan RPJMD Gorontalo 2025 – 2029

A. Visi sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 :

“Gorontalo Maju dan Sejahtera”

B. Misi sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 :

1. Mengoptimalkan Posisi Strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk Akselarasi Pembangunan
2. Mewujudkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas
3. Menstimulasi Program Kegiatan yang Dapat Meningkatkan Pendapata Masyarakat
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah sebagai Spirit Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut peran perhubungan sangat dibutuhkan dalam pencapaian 5 program unggulan yaitu :

1. Pada program pertama yaitu SDM, perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan *role model/agent of change*.
2. Pada program kedua yaitu UMKM, perhubungan memiliki peran berupa mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo
3. Pada program ketiga yaitu Agromaritim, perhubungan memiliki 3 (tiga) peran berupa :
 - a. Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara)
 - b. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara
 - c. Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor

4. Pada program unggulan keempat yaitu Pariwisata, Perhubungan memiliki 2 (dua) peran berupa :
 - a. Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan
 - b. Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo
5. Pada program unggulan kelima yaitu Infrastruktur, Perhubungan memiliki 2 (dua) peran berupa :
 - a. Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ
 - b. Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara

3.2 Tujuan Renstra

Adapun Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas
Perkotaan dan Pedesaan dengan Indikator Rasio
Konektivitas Provinsi**

3.3 Sasaran Renstra

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Rasio Konektivitas Darat
 - b. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi
 - c. Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut sebagai berikut :
 - a. Rasio Konektivitas Laut
 - b. Rasio Konektivitas Antar Wilayah
 - c. Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan

Tabel 3.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan		Rasio Konektivitas Provinsi	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	Indikator Tujuan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	
			Persentase Perengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	48.59%	48.92%	49.21%	49.67%	50.10%	50.15%	
			Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	2	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
			Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
			Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	40%	40%	40%	40%	50%	50%	

Dapat dilihat berdasarkan table diatas bahwa target kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD meningkat setiap tahunnya berdasarkan masing – masing satuan yang telah ditentukan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Program Prioritas Gubernur : Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan <i>role model/agent of change</i></p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan <i>role model/agent of change</i></p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan <i>role model/agent of change</i></p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan <i>role model/agent of change</i></p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Perhubungan memiliki peran berupa kerja sama dengan BPSDM Kemenhub RI dalam rangka menyiapkan SDM di bidang perhubungan dan pembentukan <i>role model/agent of change</i></p>
<p>Program Prioritas Gubernur : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>Mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo</p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>Mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo</p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>Mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo</p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>Mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo</p>	<p>Program Prioritas Gubernur : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>Mendorong konektivitas antar wilayah melalui layanan angkutan perintis laut dan udara di Kawasan teluk tomini, Maluku dan Papua untuk mendukung Gorontalo sebagai Gerbang Pusat Ekonomi Daerah yang dapat memberikan akses kepada pelaku usaha UMKM dimana penguatan sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan (RSU Rujukan) agar yang melakukan lanjutan studi di Provinsi Gorontalo bisa berkontribusi dalam membelanjakan dan meningkatkan UMKM di Provinsi Gorontalo, hal ini di dukung dengan mudahnya akses tol laut dan perintis yang mudah di akses di Provinsi Gorontalo</p>

TAHAP I (2025) (1)	TAHAP II (2026) (2)	TAHAP III (2027) (3)	TAHAP IV (2028) (4)	TAHAP V (2029) (5)
<p>Program Prioritas Gubernur : Agromaritim</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara) •Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara •Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor 	<p>Program Prioritas Gubernur : Agromaritim</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara) •Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara •Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor 	<p>Program Prioritas Gubernur : Agromaritim</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara) •Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara •Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor 	<p>Program Prioritas Gubernur : Agromaritim</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara) •Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara •Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor 	<p>Program Prioritas Gubernur : Agromaritim</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui konektivitas antar wilayah (layanan angkutan perintis darat, layanan angkutan perintis laut/tol laut, dan layanan angkutan perintis udara) •Mendorong peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan dan bandara •Kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk kelancaran aktivitas ekspor
<p>Program Prioritas Gubernur : Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan •Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo 	<p>Program Prioritas Gubernur : Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan •Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo 	<p>Program Prioritas Gubernur : Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan •Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo 	<p>Program Prioritas Gubernur : Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan •Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo 	<p>Program Prioritas Gubernur : Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> •Melalui layanan angkutan wisata menuju obyek wisata unggulan •Mendorong pihak maskapai untuk membuka konektivitas layanan dari dan ke Gorontalo

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Program Prioritas Gubernur : Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> •Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ •Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara 	Program Prioritas Gubernur : Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> •Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ •Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara 	Program Prioritas Gubernur : Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> •Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ •Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara 	Program Prioritas Gubernur : Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> •Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ •Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara 	Program Prioritas Gubernur : Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> •Melalui pembangunan Terminal Tipe B dan fasilitas pendukung dan penguatan pengadaan Faskes LLAJ •Mendorong Kemenhub untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara

Tabel diatas menunjukkan tahapan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai Upaya Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029.

3.4 Strategi Renstra

Dalam mendukung Visi “Gorontalo yang maju dan Sejahtera” maka berikut adalah Strategi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan angkutan jalan serta Penyediaan fasilitas terminal tipe B.
2. Peningkatan Layanan Perizinan dan Pengendalian Layanan Angkutan Umum.
3. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayaran dan Penerbangan.
4. Peningkatan layanan perizinan dan pengendalian usaha jasa terkait di perairan.
5. Peningkatan penyediaan Perlengkapan prasarana jalan diruas jalan Provinsi.
6. Manajemen rekayasa lalu lintas.

3.5 Arah Kebijakan

Dalam mendukung Visi dan Misi sesuai pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 - 2029 maka berikut adalah Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 sebagai berikut

1. Pengembangan pelayanan keperintisan, daerah terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan.
2. Layanan transportasi sekolah
3. Layanan angkutan perkotaan
4. Penyediaan fasilitas dan operasional terminal tipe B
5. Pembinaan jasa angkutan dan keselamatan transportasi
6. Transformasi Layanan Digital Angkutan.
7. Koordinasi penyelenggaraan pelayaran dan penerbangan.
8. Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan.
9. Peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ
10. Penataan Manajemen Rekayasa lalu lintas
11. Peningkatan Koordinasi Penyelenggara LLAJ
12. Peningkatan Pengawasan Andalalin

Adapun strategi dan arah kebijakan terhadap visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 terlampir pada Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

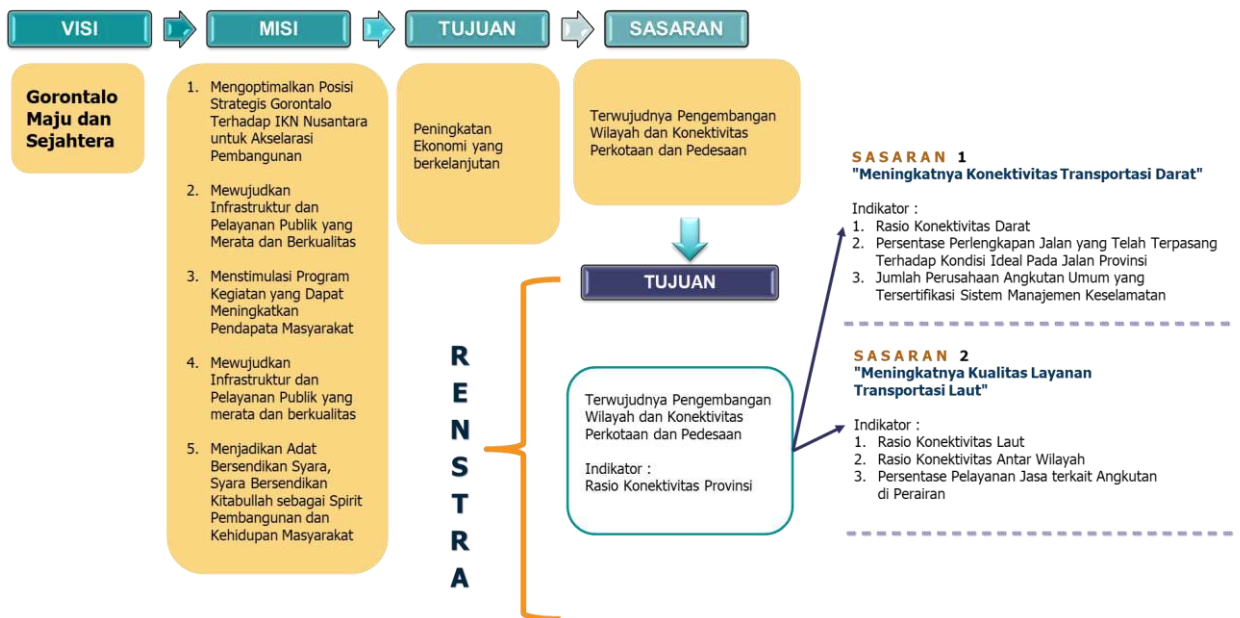
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengembangan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	<p>BIDANG LALU LINTAS JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ 2. Penataan Manajemen Rekayasa lalu lintas 3. Peningkatan Koordinasi Penyelenggara LLAJ 4. Peningkatan Pengawasan Andalalin <p>BIDANG ANGKUTAN JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelayanan keperintisan, daerah terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan. 2. Layanan transportasi sekolah 3. Layanan angkutan perkotaan 4. Penyediaan fasilitas dan operasional terminal tipe B 5. Pembinaan jasa angkutan dan keselamatan transportasi 6. Transformasi Layanan Digital Angkutan.
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Mendorong pertumbuhan serta pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk-keluar dan jalur distribusi barang dan jasa	<p>BIDANG PELAYARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pelayaran. 2. Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan.

Dalam pelaksanaannya sesuai tabel diatas dapat dilihat, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki sumber acuan arah kebijakan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam masing – masing regulasi pada masing – masing Program Kegiatan seperti Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pelayaran.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu sesuai target RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Gorontalo, dimana hal tersebut disajikan pada bagan dan table sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 sebagai berikut.

Gambar 4.1 Bagan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD 2025 – 2029 yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Perhubungan



Bagan diatas menunjukkan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada RPJMD 2025 – 2029, Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) sasaran Rencana Strategis yaitu Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Laut.

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Unit Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 15 02 1.03	KEGIATAN Pengelolaan terminal penumpang tipe B
				Tersedianya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	2 15 02 1.03.0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
				Tersedianya Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	2 15 02 1.03.0008	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
				Tersedianya terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 15 02 1.03.0010	SUB KEGIATAN Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
				Tersedianya Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 15 02 1.03.0011	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal TipeB (Fasilitas Utama dan Penunjang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat		Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.15.02.1.07	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				Tersedianya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.15.02.1.07.0013	SUB KEGIATAN Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 15 02 1.08	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersusunnya Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2 15 02 1.08 0002	SUB KEGIATAN Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
				Tersedianya Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 15 02 1.08 0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.1.10	KEGIATAN Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	2.15.02.1.10.0001	SUB KEGIATAN Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
				Tersedianya Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2.15.02.1.02.0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
				Tersedianya Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.1.02.0004	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Tersedianya Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
				Tersedianya Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.0001	SUB KEGIATAN Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Provinsi
				Tersedianya Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.0005	SUB KEGIATAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
				Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	2.15.02.1.05.0006	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
				Tersedianya Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	2.15.02.1.05.0007	SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				Tersedianya Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2.15.02.1.06	KEGIATAN Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.1.06.0003	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Tersedianya Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2.15.02.1.06.0004	SUB KEGIATAN Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut		Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	2.15.03	3 Program Pengelolaan Pelayaran
				Tersedianya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2.15.03.1.06	KEGIATAN Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2.15.03.1.06.0002	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan		Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	X.XX.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.1.02.0001	SUB KEGIATAN 'Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X XX 01 1.02 0007	SUB KEGIATAN 'Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X XX 01 1.05	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	X XX 01 1.05 0002	SUB KEGIATAN 'Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X XX 01 1.05 0009	SUB KEGIATAN 'Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	X XX 01 1.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X XX 01 1.06 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X XX 01 1.06 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	X XX 01 1.06 0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X XX 01 1.06 0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X XX 01 1.06 0005	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	X XX 01 1.06 0007	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan/Material
				Tersusunnya Laporan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	X XX 01 1.06 0008	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X XX 01 1.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X XX 01 1.07 0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X XX 01 1.07 0005	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel
				Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X XX 01 1.07 0006	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X XX 01 1.07 0009	SUB KEGIATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X XX 01 1.07 0010	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X XX 01 1.07 0011	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X XX 01 1.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X XX 01 1.08 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X XX 01 1.08 0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X XX 01 1.08 0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X XX 01 1.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	X XX 01 1.09 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X XX 01 1.09 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	X XX 01 1.09 0005	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X XX 01 1.09 0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X XX 01 1.09 0009	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	X XX 01 1.09 0010	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X XX 01 1.09 0011	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio konektivitas provinsi	Konektivitas Darat	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rasio		0.50	0.50	10.250.000.000	0.50	10.250.000.000	0.52	10.250.000.000	0.52	10.250.000.000	0.52	41.000.000.000
				2.15.02 1.03.0001	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	800.000.000
				2.15.02 1.03.0008		Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Unit	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	800.000.000
				2.15.02 1.03.0010		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	-	1 Unit	6.300.000.000	1 Unit	6.300.000.000	1 Unit	6.300.000.000	1 Unit	6.300.000.000	1 Unit	25.200.000.000
				2.15.02 1.03.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	2.000.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)		
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio konektivitas provinsi	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	2.15.02.1.07.0013	- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	4.000.000.000		
			Konektivitas Darat	2.15.02.1.08.0002	- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.200.000.000		
				2.15.02.1.08.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit (Lintasan)	14 Unit	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	1.300.000.000	14 Unit	5.200.000.000
				2.15.02.1.10.0001	- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	1.800.000.000
						- Study evaluasi KINERJA PELAYANAN angkutan KEPERINTISAN jalan															

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio konektivitas provinsi		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase		48.59%	48.92%	11.800.000.000	49.21%	11.800.000.000	49.67%	11.800.000.000	50.10%	11.800.000.000	50.10%	47.200.000.000
			Persentase Perengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	50 Unit	50 Unit	3.050.000.000	50 Unit	3.050.000.000	50 Unit	3.050.000.000	50 Unit	3.050.000.000	50 Unit	12.200.000.000
				2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	50 Unit	50 Unit	1.800.000.000	50 Unit	1.800.000.000	50 Unit	1.800.000.000	50 Unit	1.800.000.000	50 Unit	7.200.000.000
			Konektivitas Darat	2.15.02.1.05.0001	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	4.000.000.000
				2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	1.200.000.000
				2.15.02.1.05.0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit	1 Unit	1 Unit	2.100.000.000	1 Unit	2.100.000.000	1 Unit	2.100.000.000	1 Unit	2.100.000.000	1 Unit	8.400.000.000
			Persentase Perengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	100 Unit	100 Unit	1.050.000.000	100 Unit	1.050.000.000	100 Unit	1.050.000.000	100 Unit	1.050.000.000	100 Unit	4.200.000.000
			Konektivitas Darat	2.15.02.1.06.0003	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	3.200.000.000
				2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.700.000.000	1 Laporan	1.700.000.000	1 Laporan	1.700.000.000	1 Laporan	1.700.000.000	1 Laporan	6.800.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Rasio konektivitas provinsi	Konektivitas Laut	2.15.03.1.06	Program Pengelolaan Pelayanan		Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	Rasio	0.50	0.50	350.000.000	0.50	350.000.000	0.50	350.000.000	0.50	350.000.000	0.50	1.400.000.000
				2.15.03.1.06.0002	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	1.400.000.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan		100%	75%	8.604.325.553	75%	8.604.325.553	75%	8.604.325.553	75%	8.604.325.553	75%	34.417.302.212
				X.XX.01.1.01.0001	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	750.000.000	5 Dokumen	750.000.000	5 Dokumen	750.000.000	5 Dokumen	750.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000
				X.XX.01.1.02.0001	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	63 Orang/ Bulan	63 Orang/ Bulan	5.300.000.000	63 Orang/ Bulan	5.300.000.000	63 Orang/ Bulan	5.300.000.000	63 Orang/ Bulan	5.300.000.000	66 Orang/ Bulan	21.200.000.000
				X XX 01 1.02 0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	800.000.000
				X XX 01 1.05 0002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	80.000.000
				X XX 01 1.05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8 Orang	5 Orang	80.000.000	5 Orang	80.000.000	5 Orang	80.000.000	5 Orang	80.000.000	5 Orang	320.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)	
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	X XX 01 1.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	100.000.000	
				X XX 01 1.06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	3.000.000.000	
				X XX 01 1.06 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	200.000.000	
				X XX 01 1.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	200.000.000	
				X XX 01 1.06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	240.000.000	
				X XX 01 1.06 0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	140.000.000	
				X XX 01 1.06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	40.000.000	
				X XX 01 1.07 0002		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	1.800.000.000
				X XX 01 1.07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	320.000.000	
				X XX 01 1.07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	120.000.000	
				X XX 01 1.07 0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	320.000.000	
				X XX 01 1.07 0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	120.000.000	
				X XX 01 1.07 0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	80.000.000	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD (Rp)		
		TUJUAN	SASARAN							2026		2027		2028		2029					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya Pengembangan Wilayah dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	X XX 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	800.000.000		
				X XX 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	480.000.000	
				X XX 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	320.000.000	
				X XX 01 1.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	120.000.000
				X XX 01 1.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	160.000.000
				X XX 01 1.09 0005	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20 Unit	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	80.000.000
				X XX 01 1.09 0006	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	20.000.000	5 Unit	20.000.000	5 Unit	20.000.000	5 Unit	20.000.000	5 Unit	20.000.000	5 Unit	80.000.000
				X XX 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	160.000.000
				X XX 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	60.000.000
				X XX 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	19.325.553	1 Unit	19.325.553	1 Unit	19.325.553	1 Unit	19.325.553	1 Unit	19.325.553	1 Unit	77.302.212
JUMLAH											31.404.325.553		31.454.325.553		31.504.325.553		31.504.325.553		125.867.302.212		

Berdasarkan tabel program pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo seperti diatas dapat dilihat bahwa masing – masing program memiliki anggaran yang telah disesuaikan dengan anggaran pada RPJMD yakni pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 8.604.325.553, sementara pada Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 22.050.000.000 yang terbagi pada dua bidang yaitu Bidang Lalu Lintas Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.800.000.000 dan Bidang Angkutan Jalan memiliki pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000. Sedangkan pada Program Pengelolaan Pelayaran sesuai dengan pagu pada RPJMD memiliki anggaran sebesar Rp.350.000.000.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG LALU LINTAS JALAN			
1	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2			SUB KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3			SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4			KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
5			SUB KEGIATAN Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi
6			SUB KEGIATAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
7			SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
8			SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
9			KEGIATAN Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
10			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
11			SUB KEGIATAN Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG ANGKUTAN JALAN			
1	PROGRAM	Meningkatnya	KEGIATAN
2	PENYELENGGAR	Kualitas	Pengelolaan terminal penumpang tipe B
3	AAN LALU LINTAS	Layanan	SUB KEGIATAN
4	DAN ANGKUTAN	Transportasi	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
5	JALAN (LLAJ)	Darat	SUB KEGIATAN
6			Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
7			SUB KEGIATAN
8			Pembangunan Terminal
9			Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
10			SUB KEGIATAN
11			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal TipeB (Fasilitas Utama dan Penunjang)
12			KEGIATAN
13			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
14			SUB KEGIATAN
15			Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
16			KEGIATAN
17			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18			SUB KEGIATAN
19			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
20			SUB KEGIATAN
21			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
22			KEGIATAN
23			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
24			SUB KEGIATAN
25			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG PELAYARAN			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	KEGIATAN Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang terbagi yaitu Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menaungi 2 (dua) bidang yakni Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Pelayaran membawahi Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	48.59%	48.92%	49.21%	49.67%	50.10%	50.15%	
3	Rasio Konektivitas Laut	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah	2	3	3	3	3	3	
2	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
3	Persentase Pelayanan Jasa terkait Angkutan di Perairan	Persentase	40%	40%	40%	40%	50%	50%	

Sesuai dengan table diatas, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci dengan target dalam beberapa satuan yakni Rasio, Persentase, dan Jumlah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini menjadi pedoman penyusunan Renja OPD pada tahun pertama. Dokumen ini sekaligus merupakan pedoman yang menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja OPD setelah Renstra periode sebelumnya berakhir. Renja-OPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra-OPD pada periode berikutnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2025 - 2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Provinsi Gorontalo 2025 - 2029.